



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI  
DENGAN  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 25 (Dua Puluh Lima)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d.13.42 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto/F-PDP/Ketua Komisi VII DPRRI  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI  
Acara : 1. Penyampaian laporan hasil kegiatan Panja Peningkatan Pendapatan Negara sektor ESDM dan Perindustrian (Panja PPN) Komisi VII DPRRI sub sektor batu bara;  
2. *Update* pelaksanaan DMO;  
3. Program prioritas transisi energi tahun 2022;  
4. Persiapan Forum Transisi Energi G-20;  
5. Lain-lain.
- Hadir : 40 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPRRI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-P.Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

- 7 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Novri Ompusunggu

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Lamhot Sinaga
5. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E.,M.A.B
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. Ramson Siagian
2. Katherine A. Oendoen
3. Iwan Kurniawan, S.H., M.Si.
4. H. Nurzahedi, S.E.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons), M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
3. H. Marwan Ja'far

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Sartono Hutomo, S.E., M.M.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
4. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDMRI)
2. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D. (Dirjen Migas)
3. Ego Syahrial (Sekjen ESDMRI)
4. Prahoro Nurtjahyo (BPSDM ESDMRI)
5. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba Kementerian ESDMRI)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Bapak/Ibu sekalian,

Mari kita mulai rapat kerja komisi VII DPRRI dengan Menteri ESDM. Perlu saya informasikan kepada yang terhormat Anggota Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun melalui *virtual* bahwa betul rencana ini semula jam 10.00 WIB, tetapi karena akan ada tiba-tiba Korinbang meminta rapat gabungan membahas berbagai persoalan yang hari ini mengemuka, komoditas dan juga menyangkut pupuk. Maka seyogyanya, semestinya akan ada rapat setengah 10 tadi dimulai tapi karena satu dan lain hal salah satu menteri tidak hadir, maka sepakat ditunda rapat itu. Di tengah-tengah itu sebetulnya rapat dengan Menteri ESDM itu dilaksanakan jam 1 yang semula jam 10 diundur jam 1. Hanya saja kami tadi berunding dengan Bapak Pimpinan, saya, Pak Maman dan juga Pak Bambang karena Pak Menteri ini habis belum pulih betul sementara sudah hadir di kementerian, maaf di DPR maka apakah mungkin kalau rapat lantasi yang semula jam 1 dimajukan menjadi jam 11 dan kami tadi mintakan untuk di-*share* di WA grup anggota dan hari ini bisa dilaksanakan rapat yang sedianya jam 10 berubah menjadi jam 1, berubah lagi dimajukan menjadi jam 11.

Tadi itu karena ada beberapa hal, beberapa pertimbangan, sekali lagi saya selaku pimpinan rapat dan juga Pimpinan Komisi VII memohon maaf kepada anggota yang terhormat. Kesannya ini bolak-balik begitu tapi karena ada situasi yang dan kita ambil jalan yang terbaik. Mengingat sekali lagi kondisi Pak Menteri juga belum pulih betul. Nah, ini juga baru sembuh dan juga tadi masih belum sehat betul maka kita optimalkan dan kita bisa rapat dimulai jam

11 ini. Jadi, itu penjelasannya sekali lagi itu semata-mata karena pertimbangan-pertimbangan demi efektivitasnya waktu saja.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera kami sampaikan buat kita semuanya.

*Om swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI, hadir Pak Maman Abdurahman dan juga Pak Bambang tadi sudah hadir dan juga melalui *virtual* ada Pak Edi Suparno, ada juga Pak Dony Oekon,

Yang kami hormati pula segenap Anggota Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun *virtual*,

Yang kami hormati Bapak Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan jajarannya, serta hadirin sekalian.

Sudah barang tentu mengawali pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa bahwa kita semuanya sehat *wal'afiat*. Sehingga, kita dapat menjalankan tugas konstitusi kita yakni adalah melakukan rapat kerja yang sudah barang tentu tetap dengan protokol kesehatan yakni hadir fisik dan juga *virtual meeting* guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, saya selaku pimpinan sidang mengucapkan terima kasih atas perhatian atas kesediaan Bapak/Ibu semuanya anggota Komisi VII yang terhormat dan juga Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini. Dan sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada masa persidangan III tahun sidang 2021/2022. Pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dengan agenda sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan hasil kegiatan Panja Peningkatan Pendapatan Negara Sektor Energi Sumber Daya Mineral dan Perindustrian atau Panja PPN Komisi VII DPRRI sub sektor batu bara;
2. *Update* pelaksanaan *Domestic Market Obligation* perihal batu bara;
3. Program prioritas transisi energi tahun 2022;
4. Persiapan Forum Transisi Energi G20; dan
5. Lain-lain.

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan data dari Sekretariat Anggota Komisi VII DPRRI yang hadir berjumlah 26 anggota dari 8 fraksi, 26 anggota dari 52 Anggota Komisi VII yang terdiri atas 8 dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap rapat DPR bersifat terbuka terkecuali dinyatakan tertutup*”. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Dan sebelum dilanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII bahwa rapat ini selesai pada pukul 13 lewat 30 menit atau 2 jam setelah rapat ini dimulai, setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Pada tanggal 31 Januari 2022 Panja Peningkatan Pendapatan Negara sektor ESDM dan Perindustrian atau Panja PPN Komisi VII DPRRI telah menyampaikan laporan kegiatan panja dalam Rapat Intern Komisi VII DPRRI, khususnya mengenai solusi isu strategis mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan pemenuhan kewajiban *domestic market obligation* batu bara untuk pembangkit listrik;
2. Rencana pemerintah melikuidasi PLN batu bara; dan
3. Rencana pemerintah membentuk Badan Layanan Umum sebagai lembaga yang bertugas memungut iuran dan dari pengusaha batu bara untuk menutupi selisih antara harga pasar batu bara untuk domestik dan harga patokan DMO batu bara.

Dan dalam Rapat Intern Komisi VII tersebut diputuskan beberapa rekomendasi untuk pemerintah yaitu, jadi mohon sekretariat tayangkan ya. Ya, itu Bapak sekalian, ada ditayangan.

1. Komisi VII DPRRI merekomendasikan agar pemerintah membentuk entitas khusus yang bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutupi selisih antara harga pasar batu bara untuk domestik dan harga patokan DMO 70 dolar per ton. Entitas khusus tersebut dibuat guna memenuhi DMO batu bara baik yang jumlah dan harga melalui skema gotong-royong dengan fungsi:
  - a. Menjaga ketahanan cadangan dan stabilitas harga batu bara;
  - b. Meningkatkan dan mengikat kontrak batu bara yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan domestik;
  - c. Menggalang dana iuran untuk kegiatan ekspor dengan subsidi silang dan gotong-royong;
  - d. Memastikan PLN untuk tidak membeli batu bara dengan harga pasar melalui skema gotong royong yang berasal dari entitas khusus batu bara;
  - e. Meningkatkan realisasi target RKAB dari perusahaan;
  - f. Meningkatkan PNBPN atau pendapatan negara bukan pajak dan beberapa pajak turunan melalui adanya peningkatan target produksi dengan memperhatikan kondisi pasar.
2. Komisi VII DPRRI merekomendasikan agar PLN bekerja sama dengan pengusaha penyedia batu bara dalam rangka meningkatkan sistem *supply chain* PLN secara *end-to-end* termasuk sistem *procurement* dan infrastruktur logistiknya agar pemenuhan DMO dapat dilakukan lebih optimal.
3. Komisi VII DPRRI merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi dan *monitoring* bulanan terkait pemenuhan DMO dan melaporkannya kepada Komisi VII DPRRI.
4. Komisi VII DPRRI mendesak pemerintah untuk berkonsultasi dengan Komisi VII DPRRI khususnya terkait hal-hal strategis termasuk besaran DMO batu bara berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu bara.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sehubungan dengan laporan hasil kegiatan Panja PPN sektor ESDM dan Perindustrian subsektor batu bara tersebut, Komisi VII DPRRI meminta tanggapan langsung dari Menteri ESDM. Selain itu, Komisi VII DPRRI juga ingin mendapatkan penjelasan terkait *update* kebijakan dari pelaksanaan DMO batubara setelah isu krisis energi tempo hari, yang baru saja berlalu.

Selanjutnya Komisi VII DPRRI ingin mendapatkan penjelasan mengenai program prioritas transisi energi yang akan dilakukan Kementerian ESDM Republik Indonesia tahun 2022 ini, mengingat telah dicanangkannya agenda percepatan transisi energi pemerintah dengan mematok target bauran energi dari energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% di tahun 2025 dan juga komitmen pemerintah dalam pemenuhan *net zero emission* di tahun 2060.

Kemudian dalam menghadapi pertemuan G20 Komisi VII DPRRI ingin mendapatkan penjelasan mengenai persiapan dan agenda Kementerian ESDM Republik Indonesia dalam Forum Transisi Energi G20 yang telah

menjadi perhatian dan harapan dunia bagi terwujudnya sistem energi global yang berwawasan lingkungan, bersih, efisien dan berkelanjutan, harus ada di sini berkeadilan.

Baiklah.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapan dan paparannya, kami persilakan.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Izin Pimpinan, tambahan dikit mungkin dan lain-lain nanti yang mau disampaikan teman-teman.

**KETUA RAPAT:**

Ada agenda dan lain-lain berarti ya.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Iyalah.

**KETUA RAPAT:**

Iya *oke*. Terima kasih masukannya Pak yang terhormat Pak Nasir.

Dipersilakan.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik. Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota VII DPRRI, Para pejabat Kementerian ESDM, kemudian Direktur Utama BUMN, PLN dan Pertamina yang hadir secara *virtual* serta hadirin yang berbahagia.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan amanat konstitusi yaitu rapat kerja dengan agenda:

1. Penyampaian laporan hasil kegiatan Panja Peningkatan Pendapatan Negara Sektor ESDM Panja PPN Komisi VII DPRRI sub sektor batu bara;
2. *Update* pelaksanaan DMO;
3. Program prioritas transisi energi tahun 2022;

4. Persiapan Forum Transisi Energi G20; dan
5. Lain-lain.

Kami sampaikan apresiasi terkait dengan hasil yang telah dilakukan oleh Panitia Kerja Peningkatan Pendapatan Negara Sektor ESDM Komisi VII DPRRI mengenai subsektor batu bara.

Slide 4. Kami sampaikan informasi terkait dengan PNBP, realisasi PNBP sektor ESDM tahun 2021 mencapai Rp189,2 triliun atau 156% dari targetnya Rp121,2 triliun. Realisasi ini meningkat cukup tinggi karena disebabkan naiknya tingginya harga komoditas energi dan mineral. Kementerian ESDM terus mendorong peningkatan PNBP antara lain melalui program-program peningkatan industri migas, pengawasan kegiatan produksi mineral dan batu bara serta panas bumi.

Kemudian, pada tahun 2021 realisasi PNBP subsektor minerba sebesar Rp75,5 triliun di mana kontribusi terbesar berasal dari royalti dan penjualan hasil tambang batu bara yaitu sebesar Rp59,5 triliun atau 78,75% dari total realisasi PNBP minerba.

Kemudian, kami mengapresiasi hasil rekomendasi panja yang telah disampaikan oleh pimpinan sebagai upaya penyelesaian persoalan pasokan batu bara agar tidak terjadi kembali dan meningkatnya pendapatan negara dari sektor batu bara.

Terkait dengan pembuatan skema gotong-royong bisnis batu bara untuk kebutuhan domestik dan ekspor secara komprehensif agar persoalan pasokan batu bara tidak terjadi lagi, sehingga bisa memberikan kontribusi penerimaan negara yang optimal. Kami telah menindaklanjutinya, antara lain telah menyiapkan sistem *enforcement real time*, PLN juga telah mengubah kontrak menjadi jangka panjang langsung dengan perusahaan tambang. Sehingga, Kepmen ESDM Nomor 139 Tahun 2021 dapat diterapkan. Sementara untuk meningkatkan *monitoring* secara digital saat ini telah terhubung data dari aplikasi e-PNBP Dirjen Minerba dengan lembaga nasional *single window* dari Kementerian Keuangan dan juga sistem informasi pengelolaan batu bara atau Simbara.

Rekomendasi panja selain dua hal tersebut juga akan segera kami tindak lanjuti, terkait juga mengenai tadi hal disampaikan pembentukan BLU tentu saja ini akan kami respon dan ini tentu saja akan melibatkan kementerian lain dan ini sudah dalam proses pembahasan.

Kemudian *update* mengenai pelaksanaan DMO dalam rangka meningkatkan kepatuhan badan usaha pertambangan dalam memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, kami telah menegaskan pengaturan mengenai kewajiban DMO dan sanksi, harga khusus batu bara serta pedoman pelarangan ekspor, denda, dan dana kompensasi serta sanksi. Kewajiban DMO batu bara merupakan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri sebesar 25% dari rencana produksi yang ditetapkan bagi seluruh perusahaan. Sementara sanksi diberlakukan bagi perusahaan yang tidak memenuhi

kewajiban DMO sesuai kontrak penjualan berupa pelarangan ekspor ke luar negeri, kemudian kewajiban pembayaran denda atau pembayaran dana kompensasi.

Kewajiban dan sanksi ini diatur melalui Kepmen ESDM 139 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara dalam negeri. Harga khusus batu bara DMO telah ditetapkan untuk kepentingan pembangkit listrik mengacu kepada HBA sebesar 70 dolar per ton, ini ada dalam kepmen. Juga diterapkan harga khusus batu bara DMO untuk industri dengan harga sebesar 90 dolar per ton dengan Kepmen 206/2021 tentang Harga Jual Batu Bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan bakar industri.

Sebagai upaya untuk menjaga kewajiban perusahaan pertambangan untuk pelaksanaan DMO telah ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian sanksi administratif serta penjualan batu bara ke luar negeri dan pengenaan denda serta dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Ini telah ditetapkan dalam Kepmen 13 Tahun 2022, selain itu peraturan ini juga telah memberikan pedoman pemberian sanksi, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin secara berjenjang bagi badan usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pada tahun 2022 dari rencana produksi batu bara sebesar 663 juta ton rencana DMO adalah sebesar 166 juta ton, realisasi produksi hingga bulan Januari tahun 2022 untuk DMO adalah sebesar 13 juta ton. Alokasi kebutuhan batu bara dalam negeri untuk sektor pembangkit dan industri pada 5 tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat dari 165,75 juta ton pada 2022 menjadi 208,5 juta ton pada tahun 2025, yang masih didominasi oleh kebutuhan di pembangkit listrik.

Kemudian, rencana kebutuhan batu bara untuk PLTU pada tahun 2022 adalah sebesar 127,1 juta metrik ton yang terdiri dari milik PLN 64,2 juta metrik ton dan IPP 62,9 juta metrik ton dengan rata-rata kebutuhan mencapai 10 sampai 11 juta metrik ton per bulan. Untuk pengamanan pasokan batu bara PLN tahun 2022 ini kami juga telah melakukan beberapa langkah antara lain, bersama PLN menyiapkan sistem *enforcement real time* yaitu menggabungkan sistem pengawasan di lapangan dan sistem digital yang langsung terintegrasi dengan sistem informasi manajemen di Ditjen Minerba.

PLN telah juga melakukan perubahan kontrak menjadi jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan produk produsen batu bara, sehingga Kepmen 139/2021 dapat diterapkan. PLN juga telah menyelesaikan masalah *volume*, logistik, kontrak pengawasan dan *enforcement* sehingga PLN dapat memastikan patokan batu bara dalam kondisi aman.

Kemudian, kami sampaikan mengenai program prioritas transisi energi tahun 2022, capaian bauran energi primer tahun 2021 baru mencapai 11,7% guna mencapai target EBT 23% pada tahun 2025 upaya yang tengah dan sedang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan pemasangan PLTS Atap yang akan dilakukan oleh *private sector* sebesar 3,6 giga watt, pembangunan pembangkit EBT sebesar 10,6 giga watt yang masuk dalam LPTL dan

penerapan biofuel sebesar 11,6 juta kilo liter. Pengamanan EBT tersebut dapat berjalan dengan baik apabila rancangan Perpres Pembelian Energi Terbarukan segera dapat ditetapkan dan adanya kemudahan perizinan berusaha dari kementerian lembaga terkait dan tersedianya insentif fiskal dan nonfiskal.

Tingkat emisi tahun 2060 sektor energi pada skenario *net zero emission* masih sebesar 401 juta ton yang berasal dari emisi sisi *demand* rupanya terutama dari sektor industri dan transportasi. Saat ini tim *net zero emission* dari Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman *roadmap* NZE untuk mengurangi emisi 2060 sektor energi.

Berdasarkan peta jalan transisi energi yang telah disusun strategi utama yang dilakukan menuju karbon netral, di sisi *supply* antara lain melalui pengembangan energi baru terbarukan secara masif dengan fokus pada tenaga surya, *hydro* dan panas bumi serta *hydrogen*. *Retirement* PLTU dilakukan secara bertahap namun, juga kita menggunakan memanfaatkan teknologi rendah emisi seperti teknologi *carbon capture*, CCS dan CCUS dapat juga diterapkan. Sedangkan di sisi *demand* adalah antara lain pemanfaatan kompor listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di samping penerapan manajemen energi.

Direncanakan juga pengembangan supergrid untuk meningkatkan konektivitas antara sistem kelistrikan yang antar pulau untuk berbagai sumber energi terbarukan. Penerapan supergrid ini diharapkan dapat mengatasi divergensi antara sumber energi terbarukan lokal dan lokasi permintaan energi listrik yang tinggi. Selain itu pengembangannya akan mampu mengurangi dampak intermitensi dari pembangkitan variabel *renewable* energi yang semakin meningkat dan membuka peluang untuk mengeksport listrik ke negara-negara ASEAN khususnya.

Kemudian, rencana penambahan pembangkit setelah tahun 2030 ini akan berasal dari sumber energi baru dan terbarukan. Mulai tahun 2035 akan didominasi oleh *variable renewable* energi berupa energi surya dan angin, serta arus laut. Hidrogen akan dimanfaatkan secara bertahap mulai tahun 2031 dan secara massif pada tahun 2051. Sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2049.

Kemudian, pada periode transisi energi, energi fosil masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia. Minyak bumi masih sebagai energi utama untuk transportasi sebelum digantikan oleh kendaraan listrik dan gas bumi dapat dimanfaatkan untuk energi transisi sebelum EBT 100% di pembangkit. Untuk itu, Kementerian ESDM tetap mendorong peningkatan produksi migas.

Batu bara masih menjadi sumber bahan bakar untuk pembangkit sebelum adanya energi pengganti yang lebih bersih, sedangkan mineral menjadi sumber bahan utama untuk baterai. Pengembangan ke depan untuk batu bara adalah diarahkan untuk pemanfaatan di rumah tangga melalui pengembangan DME pengganti LPG. Adapun untuk mineral wajib dilaksanakannya peningkatan program peningkatan nilai tambah melalui

pengolahan dan pemurnian di dalam negeri guna mendukung pengembangan induksi baterai yang terintegrasi.

Kemudian, kami sampaikan persiapan Forum Transisi Energi G20, pada tanggal 10 Februari telah dilakukan peluncuran transisi energi G20 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mewakili Presiden Republik Indonesia bersama Menteri ESDM sebagai tanda dimulainya pelaksanaan transisi energi G20 dalam presidensi Indonesia di G20.

Tema energi transisi adalah transisi energi menuju pemulihan dan produktivitas yang berkelanjutan, penguatan sistem energi bersih global dan transisi yang berkeadilan dengan mengusung tiga isu prioritas yaitu akses, teknologi dan pendanaan. Forum Transisi Energi diharapkan dapat memberikan kesepakatan global di G20 yang lebih konkrit guna mencapai target akses energi secara global, meningkatkan pemanfaatan teknologi bersih dan intensifikasi pembiayaan transisi energi.

Dalam upaya mencapai hasil pada *Energy Transition Annual Meeting* telah disusun program-program yang diharapkan pada transisi energi G20 2022 melalui pelaksanaan 3 energi *transition working group*. Kami mengupayakan untuk dapat menyepakati *ministerial of committee* yang bertajuk *a global deal to accelerate energy transition* sebagai *lighthouse deliverable* atau dokumen hasil utama dari pilar transisi energi.

Secara ringkas grand desain transisi energi G20 2022 terdiri atas tiga pertemuan *energy transition working group* dan satu pertemuan *energy transition ministerial meeting*, serta 13 rangkaian *virtual site event IRENA investment forum* dan *EBTKE conference* dan Expo tahun 2022.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Demikian sekilas penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan, selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan untuk dilanjutkan pada sesi diskusi.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Baiklah.

Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral menanggapi, merespon apa yang telah menjadi hasil dari Panja Pendapatannya Negara Panja PPN ya.

Jadi, apa yang disampaikan Bapak/Ibu sekalian anggota komisi yang terhormat, ini juga sudah dirapatkan secara internal artinya menjadi apa yang tadi disampaikan dengan catatan-catatan tadi ada 4 poin kalau tidak salah, ya betul itu telah menjadi kesimpulan panja yang waktu itu telah dilakukan rapat internal.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri mungkin masih ada catatan-catatan dari anggota yang terhormat dari Komisi VII dipersilakan.

Pak Maman mau mengambil kesempatan?

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Mohon izin Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mohon izin untuk sedikit memberikan beberapa *highlight*-lah karena kebetulan saya juga sebagai ketua panja yang ditugaskan dan saya melaporkan dalam Rapat Pleno Internal Komisi VII.

Namun, sebelum kepada substansi rapat hari ini Pak Menteri dan jajaran Kementerian ESDM, ingin sedikit menginformasikan kemarin kita ada rapat dengan beberapa perusahaan Mind-ID. Dari rapat itu ada 1 poin penting yang sebetulnya ingin saya sampaikan supaya nanti ini bisa yaitu yang pertama adalah bahwa kita mendorong ada rekomendasi penundaan RKAB itu sebetulnya sebagai upaya untuk Kementerian ESDM memiliki nilai tawarlah dalam setiap melakukan upaya sinkronisasi kepada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN kita. Jadi, jangan hanya semata-mata Kementerian BUMN hanya sebagai cap stempel dan lain sebagainya, ataupun pemadam kebakaran. Artinya ini saya perlu saya sampaikan dulu Pak Menteri agar kita berharap ke depan Kementerian ESDM juga beberapa perusahaan-perusahaan BUMN kita bisa menjadikan Kementerian ESDM sebagai salah satu kementerian yang memang perlu dalam setiap kebijakannya diajak bicara. Jadi, itu kan sebetulnya sebuah pesan bahwa aspek sumber daya manusia memang ada di Kementerian BUMN, tapi kalau misalnya Kementerian ESDM menunda RKAB-nya kenapa kalian cari-cari Kementerian ESDM. Artinya berarti Kementerian ESDM dibutuhkan, ini sebetulnya sebuah pesan. Itu saja Pak sementara, sekedar ini.

Saya masuk kepada substansi rapat ini. Jadi kami Panja PPN/Panja Peningkatan Penerimaan Negara dalam beberapa waktu yang lalu melakukan rapat maraton itu merespon terkait isu DMO. Yang di mana kita tidak mau lagi sebetulnya Pak Menteri, kejadian ini berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang dan yang kesekian kali. Sering sekali kita sampaikan bahwa seakan-akan kita ini jadi kaya bangsa ataupun manusia yang tidak pernah belajar dari setiap

kejadian permasalahan kita karena mengingat kisruh DMO ini sudah yang kesekian kalinya. Makanya akhirnya kami dari Komisi VII melakukan rapat maraton mengundang beberapa stakeholder dan mitra dalam rangka untuk menghasilkan sebuah rekomendasi.

Ini semua berangkat dari dua hal, oh ya saya sebelumnya saya sampaikan ini adalah menjadi sebuah produk keputusan Komisi VII Pak Menteri, yang memang sudah melalui perdebatan sangat panjang. Artinya apa? Dari sisi ini berdasarkan mekanisme di internal kita ini menjadi sebuah produk institusional yang pastinya nanti dalam konteks ini kita akan memiliki keseragaman dalam menyuarakan ini kepada Kementerian ESDM. Makanya tadi mungkin ada tambahan dari Pak Nasir bahwa nanti selain ini ada hal-hal dan lain-lainnya itu silakan saja, tapi poinnya ada di situ karena terkait isu DMO ini memang sudah menjadi keputusan institusi Komisi VII.

Nah, ini berangkat dari dua hal Pak Menteri, yang pertama adalah Pasal 5 Undang-Undang Minerba kita yaitu di mana di situ mengatakan bahwa terkait mengenai kebutuhan dalam negeri dan lain sebagainya itu menjadi otorisasi Kementerian ESDM dan dikonsultasikan dengan DPR. Artinya pintu masuk mengenai *domestic market obligation* adalah Pasal 5 Undang-Undang Dasar, eh Undang-Undang Minerba kita. Nah, kalau kita merujuk dari DMO 25%, artinya apa? Berarti semua perusahaan yang bergerak atau melakukan aksi penambangan batu bara berarti wajib, itu dulu, tanpa terkecuali. Artinya apa? Itu yang tadi kita sebut ada prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh ada tebang pilih, poin dasarnya itu dulu. Namun, realisasinya bahwa tidak semua perusahaan penambang batu bara itu yang menjalankan DMO karena berbagai macam alasan, ada alasannya permasalahan teknis, alasan spek batu bara dan lain sebagainya. Tapi, kalau merujuk dari aturan tersebut tidak ada alasan, artinya mau speknya tinggi, spek bawah, spek menengah atau segala macamnya menurut kami wajib memenuhi. Namun, memang pada saat kita merujuk pada aturan tersebut tentunya akan berhadapan dengan realitas di lapangan ya itu tadi bahwa tidak semuanya juga speknya sama seperti yang dibutuhkan oleh domestik. Lalu ditambah lagi seakan-akan DMO ini hanya untuk PLN, seakan-akan. Jadi, seakan-akan bahwa kewajiban DMO ini hanya untuk PLN, jadi seakan-akan kita menganggap ini DMO, DMO PLN padahal sebetulnya yang namanya *domestic market obligation* itu berlaku untuk seluruh kebutuhan yang ada di negara kita, baik itu mungkin industri pupuk bisa jadi, baik itu mungkin industri lain-lainnya, keramik dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah itu berlaku untuk semuanya tidak hanya di PLN.

Nah, yang kita garis bawahi karena memang kebetulan PLN adalah yang paling banyak membutuhkan batu bara ini akhirnya kita lebih banyak membicarakan PLN. Namun, poinnya begini Pak Menteri, kita menyadari bahwa aspek pengawasan itu juga penting untuk diperkuat oleh Kementerian ESDM. Namun, kita sadar sekali bahwa dalam konteks pengawasan ini banyak sekali celah-celah dan kelemahan-kelemahan, maka dari itu rekomendasi dari kami dan menjadi sebuah produk keputusan Komisi VII kita mengusulkan agar dibentuk sebuah entitas khusus. Pertanyaannya apa binatang yang namanya entitas khusus ini, bagi kami, kami tidak mau terjebak pada namanya dan lain sebagainya. Tapi, kami berharap diskusi kita hari ini adalah kita masuk kepada

definisi dan substansi dari entitas khusus tersebut. Mau nanti namanya badan kah, BLU kah, apakah segala macamnya *monggo*, itu kita serahkan kepada pemerintah, kita tidak masuk ke dalam wilayah itu. Tapi, yang ingin kita tekankan adalah substansi atau definisi dari entitas khusus tersebut. Apa entitas tersebut adalah sebuah entitas yang menggunakan skema gotong royong. Kami sadar dan kami meyakini pasti Kementerian ESDM juga sudah memahami maksud dan tujuan dari entitas khusus dan skema gotong royong ini. Apa itu? Hari ini kita beredar wacana bahwa dibuat sebuah badan, lalu PLN membeli dengan harga pasar nanti seluruh perusahaan-perusahaan penambangan itu mereka berurutan menutupi selisih dari harga pasar tersebut yang dibeli oleh PLN. Kami tidak setuju itu Pak Menteri, tegas kami katakan bahwa kami tidak setuju itu.

Yang kita setuju adalah PLN tetap membeli dengan harga patokan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu harga DMO itu yaitu sebesar 70 dolar per metrik ton maksimal. Mungkin berlaku juga dengan industri yang lainnya tentunya akan berbeda-beda harganya. Yang sepengetahuan kita terkait di pupuk juga ada yang 90 dan lain sebagainya tapi itu persilakan mekanisme harga itu diserahkan kepada pemerintah. Namun, kami kembali lagi kepada entitas khusus ini, apa entitas khusus ini? PLN membeli batu bara terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh PLN seharga yang ada di dalam DMO tersebut yaitu 70 dolar. Pertanyaannya siapa yang menyuplai ke PLN tersebut? Silakan saja diputuskan oleh pemerintah perusahaan mana yang memang menjadi tugas untuk menyuplai kepada PLN sesuai dengan kebutuhan dari PLN.

Lalu selisih harga antara penjualan perusahaan A dengan PLN tersebut itu ditutupi dengan urunan ataupun gotong-royong seluruh perusahaan swasta tersebut. Silakan berapa formulasinya diatur oleh pemerintah. Pertanyaannya, ini ada pertanyaannya DMO itu kan mengatur tentang tonase, lalu perlu aturan dan lain sebagainya. Setelah kita dalam tidak perlu aturan yang berbelit, yang dibutuhkan hanya hari ini meredefinisikan apa definisi dari DMO tersebut. Selama ini kita mengartikan *domestic market obligation* itu semata-mata dikonversikan menjadi tonase, *volume* tonase. Kenapa hari ini kita terjebak pada itu, kenapa tidak kita redefiniskan bahwa yang namanya DMO ataupun *domestic market obligation* yang ditentukan oleh pemerintah itu bisa mencakup dua hal, bisa terkait *volume* tonase batu bara *plus revenue* yang ada di seluruh perusahaan-perusahaan batu bara tersebut. Artinya apa? Kalau kita bisa meredefinisikan ini prinsip pemerataan ataupun keadilan bagi seluruh perusahaan serta betul-betul menjalankan kewajiban DMO itu akan berjalan. Artinya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang beralasan hari ini di seluruh Indonesia bahwa spek kita tidak sesuai Pak. Oleh karena itu, ya sudah Pak izinkan kami untuk ekspor *yo wes*, ada denda dan lain sebagainya. Hari ini menurut kita kalau DMO itu diredefiniskan menjadi 2 hal tadi dari aspek *volume* dan aspek *revenue* selesai urusannya Pak Menteri. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi seluruh perusahaan-perusahaan itu untuk tidak memenuhi DMO. Nah, kalau ini bisa terjadi Pak Menteri, permasalahan PLN terkait mengenai kebutuhan batu baranya juga bisa diselesaikan.

Jadi, saya pikir itulah kurang lebih *highlight* ceritanya dan kalau dalam rekomendasi kesimpulan secara tekstual kurang lebih seperti itu. Tapi, poinnya secara substansi ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri dan nanti silakan teman-teman bisa merespon. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang kita, tanpa harus mengesampingkan penguatan dari sisi pengawasan. Namun, setidaknya kita bisa menyelesaikan pada dua hal yaitu pertama prinsip keadilan, yang kedua adalah penerapan aturan DMO secara tegas dan secara konsisten.

Itu saja Pak Menteri.

Terima kasih.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Interupsi sedikit, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar yang terhormat Pak Nasir.

Tadi, Pak Ketua Panja menambahkan beberapa hal penekanan-penekanan yang menjadi hasil dari Panja PPN perihal batu bara terlebih khusus menyangkut tentang DMO, ya jadi itu.

Interupsinya menyangkut apa Pak Nasir.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Menyambung sedikit Pimpinan, menyambung sedikit dari Pak Maman tadi.

**KETUA RAPAT:**

Oke, iya boleh.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Langsung pendalaman aja Pak Ketua, izin. Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin Pak Menteri kondisinya memang betul-betul udah fit ya, tadi agak batuk-batuk berapa kali, kalau nggak kita skor dulu gitu atau tunda kalau belum sehat, maksud saya gitu Pak Menteri, berapa kali tadi saya lihat berhenti batuk berhenti batuk gitu, kalau memang belum sehat jangan kita paksakan, Pimpinan.

Terus yang kedua tadi memang benar, DMO ini kita minta di dalam rapat ini harus tuntas keputusannya seperti apa. Jadi, nggak ada perusahaan nanti yang menyetorkan uang, tidak membayar DMO-nya tapi harus *clear* seperti apa poinnya.

Mungkin itu aja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baiklah, kita mulai pendalaman lebih lanjut.

Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan yang terhormat Bapak Andi Wittiri atau yang kita kenal Bapak yang terhormat Iwan Dasi.

**F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kita hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPRRI, Yang kami hormati Pak Menteri bersama Pak Dirjen dan jajarannya, kelihatannya agak loyo-loyo nih habis bergaul sama Omi Pak ya, saya lihat sudah sehat.

Saya hanya sedikit mau menyampaikan Pak, ada keluhan dari beberapa pengusaha yang sebelumnya kena peringatan tentang DMO, sehingga mereka tidak bisa ekspor. Mereka menyampaikan bahwa RKAB kami yang tahun 2021 itu masih ada yang tidak dijual atau tidak dimanfaatkan, atau di ekspor atau tidak DMO pada tahun 2022. Sehingga mereka meminta, apakah kekurangan DMO kita itu yang tahun 2021 itu bisa kami penuhi di tahun 2022 ini karena itu RKAB-nya masih 2021 sehingga izin ekspor mereka bisa dibuka kembali. Ini saya sampaikan karena beberapa kunjungan kami ke daerah beberapa pengusaha batu bara menyampaikan ke kami dan ini kami teruskan kepada Pak Menteri bersama jajarannya.

Itu saja Pak Menteri.

Sekian. Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Andi Wittiri dan kita lanjutkan dari Fraksi Partai Golkar, ada Ibu Diah ada atau Pak Pimpinan mau memanfaatkan, Ibu Diah, oh berikutnya saja.

Dilanjutkan Fraksi Gerindra yang terhormat Bapak Ramson, dipersilakan yang terhormat.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan rekan-rekan anggota yang terhormat, Pak Menteri, saya balik lagi nih ke Komisi VII DPRRI dan para dirjen yang terhormat.

Sudah selesai tugas mendukung percepatan vaksinasi, sehingga sekarang tinggal ke *booster* jadi saya mendukung Pak Budi Gunadi, *alhamdulillah* cukup efektif. Jadi, Pak Menteri ini menarik dari, ini baru saya dapat datanya bahwa waktu saya di Komisi Kesehatan, saya membaca bahwa hampir terjadi krisis *supply* energi listrik sebabnya karena krisis *supply* energi primer batu bara. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan karena pada saat itu 2021 produksi kita 435 juta ton, padahal kebutuhan DMO-nya waktu itu ditetapkan 133 juta ton. Dan DMO itu selain hanya soal *volume* juga soal harga, di sini sebenarnya diperlukan kebijakan Menteri ESDM ataupun kebijakan pemerintah yang lebih luas agar bisa membuat kebijakan operasional yang fleksibel. Jadi, sehingga jangan sampai ketersediaan energi primer kita itu bisa kritis, sehingga energi listriknya juga kritis. Ini yang problem, di satu sisi memang rakyat masih belum siap kalau harga listrik itu dinaikkan sesuai dengan mekanisme pasar. Sehingga, proteksi DMO itu dengan harga bukan hanya *volume* itu memang satu kebijakan yang apa namanya, suatu tuntutan, tuntutan realitas sesuai konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45 bahwa kita harus menyelamatkan kepentingan rakyat banyak. Ini kan sebenarnya soal kalau kita lihat juga dari sisi PNBPN, saya lihat di sini tadi barusan bahwa PNBPN antara batu bara dengan minyak dan gas itu sangat jauh. Saya lihat tadi PNBPN-nya 2021 hanya Rp28,8 triliun ini juga sangat kecil.

Makanya suatu saat kalau bisa dapat data *volume* penjualan batu bara selama 2021, 425 juta ton itu kalau dinilai rupiah berapa banyak, mungkin ini Pak Dirjen-nya nanti yang bisa mengetahui ini. Kita perlukan data ini, sehingga kita bisa melihat dengan PNBPN yang cukup kecil. Jadi, ini yang sangat diperlukan jangan sampai terulang lagi 2022 ada krisis *supply* energi primer batu bara karena kita lihat kebutuhan PLN juga meningkat, di satu sisi kita artinya lagi *trend heavy*-nya ke energi terbarukan, tapi kebutuhan di sini yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 2021, 130 setengah juta ton batu bara untuk, ini untuk ...*(suara tidak jelas)*...113 juta ton, 2022, 127, 128 terus meningkat. Ini di satu sisi juga kebutuhan dalam negeri juga meningkat secara total, dari prediksi ini mungkin akan lebih bahwa 2025 kan diperlukan 208,5 juta ton. Ini yang perlu dilihat bagaimana sistem pengamanannya, sehingga jangan sampai kebutuhan dalam negeri kita terganggu.

Di satu sisi seperti ini ekspor untuk 2022 juga akan meningkat, 2021 juga meningkat sangat besar dan ini produksinya akan ada peningkatan juga di 2022 akan menjadi 663 juta ton dengan DMO 166 juta ton, sehingga cukup besar. Produksi itu cukup besar, kita terus terjadi peningkatan produksi batu bara karena *demand* di luar negeri atau global, khususnya Cina dan India ini meningkat karena mereka masih terus memakai energi batu bara sampai sekitar tahun 2045 sampai pada saat itu mereka akan masuk ke betul-betul energi terbarukan, sekarang mereka pompa dulu gitu.

Ini kebijakan ini yang harus artinya diamati oleh Menteri ESDM di dalam hal soal pengamanan ketersediaan energi primer kita, khususnya batu bara karena pembangkit listrik kita masih mayoritas menggunakan energi primer batu bara. Ini jadi problem juga seperti kemarin terjadi *critical* seperti itu menjadi *problem* juga dan saya melihat bahwa DMO 25% itu bukan perusahaan sebenarnya, keputusan antara DPRRI dengan pemerintah bahwa DMO 25% dari produksinya, bukan dari perusahaan. Itu perusahaan itu bagaimana kebijakan operasional dari Menteri ESDM, ini yang harus tegas karena memang ada mungkin perusahaan pertambangan batu bara yang produksinya itu, kadarnya itu, kalorinya tidak memenuhi untuk digunakan di dalam negeri, bisa saja itu terjadi. Khususnya seperti PLN ini bagaimana membuat kebijakan itu bahwa 25% itu betul-betul dari total produksi. Jadi, tidak harus per perusahaan. Ini yang harus dibuat kebijakan operasional yang tepat.

Saya pikir sementara itu saja karena memang ini juga beberapa saja peta jalan transisi energi menuju karbon netral ini. Saya lihat ini masih memerlukan detail strategi operasionalnya karena kadang-kadang juga ada kontradiksi dengan yang melaksanakan operatornya, *problem*-nya karena sampai beberapa tahun yang lalu semua perencanaan pengembangan pembangkit listrik di PLN itu masih menggunakan energi primer batu bara. Ini menjadi suatu tantangan juga agar peta jalan transisi energi menuju karbon netral ini bisa betul-betul direalisasikan nanti kalau ini belum terlalu aktual. Yang saya lihat aktual tadi soal jaminan ketersediaan energi primer batu bara untuk pembangkit listrik dan juga untuk keperluan dalam negeri, industri-industri lain yang memang diperlukan untuk pengembangan industri dalam negeri untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan. Sehingga, hilirisasi tetap memerlukan energi primer karena industri dalam negeri kita perlukan untuk pengembangan hilirisasi. Sehingga, itu harus sinkron antara kebijakan-kebijakan hilirisasi pemerintah dengan, termasuk ketersediaan energi batu bara yang saya lihat tadi di mana di sini ada seperti untuk pengolahan pemurnian pupuk, semen, tekstil, kertas, industri kimia dan hilirisasi batu bara. Ini yang perlu harus dibuat betul-betul kebijakan operasional yang *match* gitu.

Itu aja Pak Menteri, terima kasih.

Pak Ketua, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.*

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak yang terhormat Pak Ramson,

Menggarisbawahi bagaimana DMO tidak sekedar perusahaan-perusahaan tetapi dari *volume* produksi 25% dan juga digarisbawahi betapa kita harus *inline* kebijakan antara kehandalan dan kemandirian energi dengan misalnya *zero emission*. Jadi, tidak satu menjadi apa *tread off* terhadap yang lain.

Terima kasih yang terhormat menjadi catatan Pak Menteri.

Dilanjutkan dari Fraksi Nasdem dipersilakan Pak Rico.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Terima kasih Pimpinan,  
Terima kasih rekan-rekan,  
Terima kasih juga kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan paparannya yang menurut saya sangat luar biasa komprehensifnya.

Kurang lebihnya sama seperti dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pimpinan Pak Maman dan Pak Ramson terkait dengan batu bara tadi. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendapatan negara yang terjadi di dapil kami dan ini merupakan aspirasi juga terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa kontrol pemerintah di kampung Masrawi Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Teman-teman dari berbagai aliansi di Papua Barat menginginkan saya menyampaikan kepada Pak Menteri, juga Pak Dirjen ya Pak Dirjen Minerba. Kalau boleh ini pertambangan yang sekarang ini begitu banyaknya eskavator yang bekerja di sana mengambil emas dan lain sebagainya. Ini kan boleh dibidang peti ya yang sementara ini kita sedang giat-giatnya, gencar-gencarnya untuk dilawan ya. Nah, kalau boleh untuk merangkul semuanya, saya berharap izin-izin ini bisa diterbitkan untuk masyarakat yang punya lokasi di sana. Sehingga, para investor yang mau kerja pun mereka menjadi nyaman, para aparat pun tidak membuat blog-blog sehingga terjadi keributan, keresahan di sana.

Nah, oleh karenanya, harapan saya Pak Menteri, kalau boleh didata dan kemudian disahkan dengan diterbitkan izin sehingga bisa menjadi pendapatan buat daerah dan negara dan semuanya bisa sejahtera begitu. Lain-lain saya pikir nanti akan kita dalami terkait dengan EBTKE Pak Dirjen izin teman-teman di dapil kemarin juga masih nanya-nanya di 12 kabupaten dan 1 kota di dapil saya terkait dengan kapan sih ini dibangun PJUTS-nya begitu.

Terima kasih Pimpinan, mungkin itu saja. Terima kasih rekan-rekan.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Nico Sia dari Dapil Papua Barat tapi aspek lain ternyata yang disampaikan, perihal tentang pertambangan ini Pak Dirjen, Pak Menteri.

Ya, dilanjutkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, belum ada yang ini ya. Dilanjutkan Fraksi Demokrat, Pak Nasir, Kapoksi atau Pak Nasir.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Sudah izin kapoksi, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,  
Teman-teman anggota Komisi VII,  
Baik, terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Menindaklanjuti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panja mungkin izin Pak Menteri, bisa ditindaklanjuti supaya regulasi ini tidak berulang kali menjadi masalah supaya tuntas karena dari periode sebelumnya pun ini sudah bermasalah, konsepnya lahir DMO. Nah, sekarang DMO ini perlu penguatan tapi segera diputuskan. Menurut saya bagaimana regulasi ini bisa benar-benar, nah saya kemarin ada Pak dengar juga ekspornya udah dibuka, apa nanti ini masalahnya sudah selesai, masalah DMO-nya. Nah, yang saya dengar dia membayar uang, jadi kami menyetorkan uang kata dia, baru kami dikeluarkan izin ekspor gitu. Saya agak bingung. Nah, mungkin mohon izin Pak Menteri supaya ini kita putuskan dululah, seperti bagaimana regulasi ini. Apakah perlu permen yang harus Bapak keluarkan untuk memperkuat ini menjadi satu kesatuan kerja yang kuat. Menurut saya kita putuskan dulu Pak Menteri, supaya ini jangan asik kita kalau rapat dengan Pak Menteri DMO aja bahasannya gitu. Memang tidak spesialnya untuk PLN, tapi untuk industri seluruhnya yang ada di republika kita.

Mohon izin untuk segera bisa apa sih solusi dari, apakah perlu Keputusan Presiden, nawacitanya seperti apa, apa keputusan dari Pak Menteri. Jadi, lahirlah ini seperti yang bisa memperkuat regulasi ini Pak Menteri. Jadi, kami minta Pak Dirjen, izin Pak Menteri untuk bisa dengan panja ini memutuskan dan putusan itu Pak Menteri yang putuskan biar segera jalan dan tidak menjadi bahan rapat kita lagi. Ini DMO-DMO itu kan masih banyak yang mau kita bahas Pak Menteri sebenarnya. Mungkin itu inti dari yang kami sampaikan di rapat ini.

Dan yang kedua Pak Menteri mohon izin, mungkin masalah pengangkutan PAM. Saya dapat masukan dan mungkin sudah pernah juga saya sampaikan dengan Pak Menteri, saya, menurut saya bagus PAM ini diserahkan kepada Pertamina karena produksi PAM ini pun yang memproduksi

Pertamina. Nah, jadi ada selisih Pak Menteri yang kami lihat di sana, perselisihan angkutan ini satu bulan mencapai perselisihannya 1 triliun. Nah, mungkin ini perlu dicek ulang Pak Menteri, sebaiknya Pertamina menawar 2 triliun dan regulasi sekarang menjalankannya 3 triliun. Nah, alangkah baiknya ini diserahkan ke Pertamina karena Pertamina ini kan negara juga menurut saya. Seingat saya, saya waktu ketemu menyampaikan Pak Menteri, Pak Menteri suruh turun 5 dolar, eh 5 sen sampai 10 pun nggak apa-apa yang penting kita serahkan kepada di bawah swasta. Nah, mungkin di dalam rapat ini bisa juga nanti menjadwalkan, jadwalkan ulang untuk memanggil Pertamina dan memanggil regulasi ini Pak Menteri, supaya ini bisa diputuskan dan menjadi pemasukan buat Pertamina menurut saya karena mereka punya satuan kerja tentang pengangkutan. Menurut saya alangkah baiknya ini seperti yang saya waktu sampaikan ke Pak Menteri untuk memperkuat ini, kita putuskan di komisi saja Pak Menteri. Jadi Pak Menteri bisa menjalankan regulasi sesuai keputusan yang menguntungkan buat negara menurut saya.

Terus hal-hal lain, mungkin masalah RKAB mungkin saya minta segera dituntaskan dan kalau memang perusahaannya juga perlu pengecekan segera mungkin dilakukan. Izin Pak Dirjen untuk segera memutuskan semua regulasi ini gitu supaya jangan menjadi hambatan Pak Menteri, supaya bisa berjalan dengan baik.

Jadi, mungkin hal-hal lain untuk peningkatan kegiatan yang dilakukan tadi saya lihat di sini ada upaya pencanangan target energi baru terbarukan. Ini yang melaksanakan PLN berarti ya Pak, izin Pak Menteri, izin Pimpinan.

#### **MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Jadi EBT ini ada 2, satu yang terkait dengan RUPTL yaitu PLN. Kemudian yang PLTS *rooftop* itu swasta tapi nanti dengan komunikasi PLN.

#### **F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Izin Pak Menteri, menambahkan sedikit.

Kami mohon nih masalah PJUTS ini kalau bisa serahkanlah ke PLN, kami udah kena marah-marah di dapil. Ini pasangan 3 tahun yang lewat, sekarang baru di ini tahun yang semalam aja 10 hari dipasang mati, jadi yang mau ditelepon nggak ngerti siapa. Mohon supaya yang satu ini jangan ditahan lagi Pak Menteri, kalau bisa diputuskan juga dalam keputusan kesimpulan bahwa untuk anggaran PJUTS kita minta Kementerian ESDM menyerahkan anggaran itu ke PLN, mohon Pak Menteri supaya kita ini udah taruhnya depan masjid lagi, aduh pening kena marah-marah terus Pak Menteri. Mohon perasaan hati kami ini bisa dipahami Pak Menteri gitu, jadi mohon disampaikan di kesimpulan Pimpinan, supaya jangan menjadi masalah dan program ini memang menggunakan dana APBN. Jadi, takutnya kami juga diolok-olok di daerah itu kurang enak, Pak. Jadi, ini mohon pengertian dari Pak Menteri keputusan ini kita sampaikan di dalam kesimpulan nanti, supaya ini tidak menjadi masalah belakang hari gitu.

Jadi, untuk hal-hal lain mungkin nanti penambahan saja berikutnya Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahita'ala Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Nasir dari Fraksi Demokrat, dilanjutkan Fraksi PKS ya.

Dipersilakan yang terhormat Ibu Diah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Pertama, mohon maaf keterlambatan dengan perubahan jadwal rapat, tapi tadi saya mengikuti secara *virtual*. Jadi, arti pembahasannya saya ikuti semua. Yang ingin kami sampaikan pertama adalah tentunya kami juga mengapresiasi tindak lanjut dari krisis ya. Meskipun, kemarin terjadi krisis pasokan batu bara dan kemudian permasalahan dengan PLN. Lalu sudah ada beberapa langkah yang dilakukan, yang diharapkan ini bisa mengubah kondisi ketersediaan batu bara untuk sebagai pasokan sumber energi di PLN.

Dan kami menyoroti juga bahwa peraturan tentang masalah DMO ini bukan semata-mata adanya perbaikan dalam persoalan aturannya. Tetapi, bagaimana penegakannya ini kan selalu persoalannya kepada bagaimana penegakannya. Penegakan dari aturan yang sudah dibuat, kalau kita memulai kembali di tahun 2022 dengan beberapa perbaikan tadi perubahan kontrak dan seterusnya. Tapi, kami juga berharap permasalahan di 2021 tidak dilepas begitu saja. Artinya kalau ada sanksi yang harus ditegakkan ya sanksi tersebut harus ditegakkan dan kami berharap adanya keterbukaan, perusahaan mana saja yang sampai dengan sejauh ini belum memenuhi kewajiban DMO-nya dan saya kira proses pengawasan dari Komisi VII ini Pimpinan, ke depan barangkali harus lebih terbuka ya secara berkala juga kami diberikan informasi tersebut karena ini adalah saya pernah sampaikan ya listrik ini kan kebutuhan masyarakat banyak, tidak bisa kita bermain-main dengan persoalan itu. Karenanya semua pihak yang terkait dengan masalah ini juga harus memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi, itu terkait dengan penegakan aturan.

Yang kedua Pimpinan, terkait dengan skema BLU yang direncanakan untuk mengatasi persoalan ini. Kami berharap ada penjelasan lebih jauh tentang konsep ini karena jangan sampai dengan konsep ini juga ada sebagian pihak yang mungkin sangat diuntungkan dan ada yang dirugikan. Konsep ini harus betul-betul ya memberikan satu hasil yang sangat optimal bagi semua pihak dan ini saya pikir harus kita dalam lagi lebih jauh.

Kemudian, yang ketiga terkait dengan transisi energi ya pada tahun 2022 ini, kami lihat ini memang masih belum memenuhi dari capaian target yang diharapkan. Nah, ini kalau kita mengacu pada target tahun 2030 itu kan, sementara sekarang saja masih pencapaiannya masih lebih rendah daripada apa yang seharusnya dicapai pada tahun 2021. Ini bagaimana langkah-langkah dari Kementerian ESDM untuk mengejar ketertinggalan tersebut dan atau apakah target pada tahun 2030 tersebut juga masih dimungkinkan untuk dicapai atau tadi ada upaya *extra-ordinary* apa yang harus dilakukan untuk berusaha mengejar ketertinggalan capaian yang target yang sekarang ini ada.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yang terhormat Ibu Diah dari Fraksi PKS, menggarisbawahi beberapa hal tentang DMO, tentang energi transisi dan sebagainya.

Dilanjutkan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Oh ya perlu saya sampaikan kembali bahwa betul memang mestinya ini rapat jam 1 tetapi karena satu dan yang lain hal, ini beliau-beliau memang baru dinyatakan negatif. Pak Menteri baru dinyatakan negatif ya hari Jum'at yang lalu Pak ya, minggu lalu maksudnya. Sementara Pak Dirjen Minerba itu baru dinyatakan negatif adalah hari Senin yang lalu kalau nggak salah. Jadi, karena tadi mestinya ada rapat gabungan karena dibatalkan, maka kami berdiskusi apa nggak sebaiknya dimajukan dan ternyata, tapi sekali lagi saya selaku Pimpinan mohon maaf kalau tidak terkonsolidasi dengan baik. Tapi, intinya kita agar semuanya efisien dan ini menyangkut hal yang sangat-sangat prinsip kesehatan.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Pimpinan, Sartono, mengingatkan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sartono.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Kita rapat sampai jam berapa rapat kerja ini apa sudah diketok.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah diputuskan sampai jam 1 saja.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Oke, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Telah menyampaikan pendalamannya tadi. Tadi, kalau memang masih ada, mungkin saya bisa buka di sesi kedua. Pak Gunhar dari PDIP ada catatan-catatan, ini menyangkut DMO ya.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

Jadi, Pak Menteri beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan RDP dengan Asosiasi APBI dan Ketua Umum Kadin, keterkaitan soal DMO dan entitas khusus skema gotong-royong yang disampaikan oleh Ketua Kadin. Jadi, kita sepakat ya sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 itu di Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), kita memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah untuk membentuk skema apa yang lebih cocok dan lebih tepat untuk mengganti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tempo hari dengan sistem BLU ya. Jadi, kita berikan kewenangan ya, kita *support* kepada Menteri ESDM untuk menjamin ketersediaan batu bara dan kepatuhan daripada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi DMO batu bara itu.

Itu saja mungkin, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, cukup ya Pak Gunhar. Jadi, menggarisbawahi bahwa itu adalah dari hasil rapat dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dengan Kadin, dengan pelaku-pelaku usaha di batu bara, sehingga format.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Izin, PKS, alam ghaib, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh iya PKS ya, oke nanti kita selanjutnya nanti ke Mulyanto salah satu yang akan memberi pendapat.

Dipersilakan Golkar Ibu Roro.

**F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):**

Terima kasih Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII, dan tentu yang hadir pada Raker kali ini Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran yang hadir.

Saya ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, berkaitan mengenai DMO ya. Tadi, sudah beberapa kali disampaikan oleh teman-teman. Tapi pada intinya saya hanya memohon saja Pak Menteri, bahwasanya ke depannya ini ada skema yang terkhusus adil gitu ya, adil dan juga merata untuk seluruh badan usaha pertambangan, baik yang speknya itu sesuai dengan PLN maupun yang tidak gitu. Jadi, ini tolong dimatangkan.

Lalu, kemudian, mungkin ada baiknya gitu ya ke depannya dibangun semacam apa *blending facility* buat batu bara yang bisa mencampur spek yang tinggi ke spek yang rendah. Jadi, ini hanya untuk memitigasi aja permasalahan yang kemarin sempat berkembang sesuai daripada standar yang dibutuhkan. Tapi pada dasarnya saya memohon juga sebetulnya ya, mungkin nggak hadir di sini tapi pada intinya dari segi perencanaan itu juga harus kita perbaiki juga gitu dari pihak PLN.

Lalu, kemudian, yang kedua berkaitan mengenai program prioritas transisi energi dan nanti saya akan lanjut mengenai G20. Yang pertama, tentunya kami apresiasi karena pada dasarnya memang banyak sekali langkah yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dan tadi terbukti dari beberapa paparan yang disampaikan, bahwasanya kita memang sudah komit dan ini komitmen baik dari presiden langsung dan ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dan secara nasional sekarang kita sudah menjurus terhadap transisi energi.

Namun, kami ingin menggarisbawahi bahwasanya saat ini pencapaian daripada bauran energi terkhusus berkaitan dengan energi terbarukan kita itu masih di bawah daripada target yang ditetapkan melalui RUEN untuk tahun 2022 yang kalau tidak salah itu berada di 15,7%. Nah, maka walaupun ya kalau kita berbicara mengenai RUEN itu ada kaitannya juga dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi gitu. Tapi pada intinya kan ini ada sebuah target yang di mana kita harapkan untuk bisa terealisasi dengan berjalannya waktu gitu. Jadi, dengan berbagai macam inovasi dan mungkin *grand plan* yang tadi sudah disampaikan perlu dilakukannya percepatan gitu

agar kita bisa melihat apa namanya efeknya terhadap capaian-capaian daripada target yang sudah ditetapkan.

Lalu, tadi di *slide* nomor 14 dijelaskan mengenai beberapa hal yang dilakukan dalam tahap *exercise* gitu yang, baik itu *face out* batu bara. Nah, mengenai *face out* batu bara ini saya ingin tahu gitu, *timeline* dan *planning* ke depannya itu seperti apa karena kita tahu bahwa mayoritas dari sumber yang digunakan untuk pembangkit listrik di Indonesia datang dari batu bara. Jadi, ini juga harus dijabarkan kembali bagaimana *long term planning*-nya dan agar kita ketika bertransisi itu bisa dilakukan se-*smooth* mungkin.

Lalu, kemudian, tadi ada pembahasan mengenai sisi US itu kami apresiasi, tapi lebih saya ingin menekankan *carbon pricing*. Jadi, kalau yang saya ketahui pemerintah itu sudah *set carbon pricing* sistem dengan nilai 2,5 dolar per metrik ton of CO<sub>2</sub>. Saya ingin mengetahui implikasinya apa gitu terhadap eksisting pembangkit listrik yang sumbernya datang dari apa tenaga fosil yang, energi fosil. Lalu, kemudian, apakah ini mempengaruhi harga secara keseluruhan karena kan kita ya harapannya dengan kita menerapkan *carbon taxing* di Indonesia itu ada dampaknya terhadap harga. Di mana harapannya EBT ataupun sumber yang lebih ramah lingkungan itu bisa lebih kompetitif gitu karena semakin saya, mungkin Bapak-bapak di sini juga kita sering ketemu di webinar gitu yang. Maksudnya yang selalu menjadi permasalahan utama adalah harga gitu. Kalau, misalnya dalam semangat transisi energi tapi dari segi harganya masih saja kurang kompetitif. Tentu, kita akan lebih mengutamakan apa yang lebih masuk akal dari segi bisnisnya gitu *what makes more business sense*. Nah, itu saya kepingin apa sih jalan keluarnya gitu karena selama ini saya masih merasa *stuck* terhadap permasalahan harga ini.

Lalu, yang terakhir Bapak, ini tadi saya lihat di *slide* 20 mengenai peluncuran transisi energi tentunya apresiasi karena saya juga hadir tapi gambar saya nggak ada di sini Pak Menteri. Jadi, ini mungkin catatan kali ya Ketua ya untuk mitra kerja kita, tapi pada intinya saya ingin *sharing* Pak Menteri bahwa beberapa hari yang lalu presidensi dari COP26 Alok Sharma itu beraudiensi dengan Pak Menko Perekonomian. Di mana Pak Airlangga Hartarto ini kan juga Ketua Presidensi daripada G20, tapi pada intinya adalah untuk meningkatkan kolaborasi lintas negara gitu ya. Saya harapkan kemarin saya sampaikan juga pada kegiatan peluncuran transisi energi ini bahwasanya selepas dari pembahasan yang selama ini dalam beberapa bulan ke depan akan kita lakukan. Kita harus ada hasilnya gitu Pak Menteri. Jadi, tentu kita ingin meningkatkan kerja sama lintas negaranya. Lalu, kemudian, bagaimana kita bisa bernegosiasi dari segi *funding* juga gitu. Di mana dalam posisi negara Indonesia membutuhkan bantuan sebetulnya dari segi *climate funding* dari negara-negara mungkin yang sudah lebih berkembang.

Jadi, Indonesia ini bagaimana ke depannya bisa menjadi *Global Fund Mobilizer*. Nah, ini juga mungkin sesuatu hal yang patut untuk kita renungkan bersama.

Lalu, kemudian, bagaimana mungkin negara Indonesia ini bisa dioptimalkan sebagai negara yang ditargetkan untuk mengerjakan program-

program *carbon of setting* berdasarkan mungkin *existing* industri di luar Indonesia yang memang menghasilkan emisi yang tinggi gitu. Otomatis dengan Indonesia menjadi target negara buat program-program *carbon of setting* itu akan membantu negara Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Ini juga sesuatu hal yang mungkin menarik gitu untuk kita telusuri.

Lalu, kemudian, kemarin saya sampaikan juga mengenai *transfer of knowledge innovation*, Pak Menteri. Jadi, Indonesia ini juga harus mendapatkan sesuatu gitu ya dengan keterlibatan lintas negara. Bagaimana kita bisa *transfer of knowledge* kita bisa belajar dari negara lain dan kita juga bisa menerapkan inovasi dalam negeri agar kita pun bisa andil gitu dalam misalnya pengembangan energi terbarukan. Syukur-syukur memberdayakan sumber daya manusia kita gitu ya, dengan kemampuan lokal kita mengembangkan pembangkit listrik yang pada dasarnya kita juga bisa independen dalam hal ini. Nah, ini sesuatu hal yang saya harapkan ke depannya juga bisa menjadi salah satu apa yang fokus kita ke depannya.

Mungkin sekian saja beberapa poin dari saya.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Ibu Roro, luar biasa banyak catatan yang memang spesialis tentang transisi energi.

Saya kira ya kita semuanya memang, transisi energi bukan lagi pilihan tapi adalah sebuah keharusan. Hanya saja betul sebagaimana juga diingatkan oleh yang terhormat Pak Ramson semuanya harus *inline*, tetap energi kita tetap handal, tetap mandiri, tetapi juga bisa masuk ke energi transisi secara baik.

**ANGGOTA:**

Pak Ketua, catatan penting tadi yang kata Bu Esti, adil. Baru saya dengar kata-kata adil selama di rapat ini.

**KETUA RAPAT:**

Oke selanjutnya dilanjutkan dari, setelah Golkar, Gerindra kalau masih ada catatan.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Sartono, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya lanjutkan Gerindra, ya dipersilakan.

**F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):**

Izin Pimpinan, terima kasih waktunya.

Pimpinan saya, izin Pimpinan selamat siang.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman serta Pak Menteri dan jajarannya yang terhormat.

Kalau bicara tentang DMO semua teman-teman kami sudah banyak memberikan masukan tentang DMO. Saya hanya ingin sedikit memberikan penguatan seperti yang Pak Nasir mengatakan PJUTS sebaiknya dikasih wewenang kepada PLN karena di dapil kami banyak keluhan. Pemasangan PJUTS baru 3-4 hari sudah pada putus dan sekarang hanya tiang-tiangnya saja. Jadi, kami sebagai wakil rakyat sangat malu kepada masyarakat kami. Apa yang kami berikan itu tidak menjadi kebanggaan masyarakat, tapi menjadi rongsokan di masyarakat. Itu kan kita lihat kerugian negara berapa banyak. Itu baru tiang mungkin di dapil saya, belum lagi di dapil-dapil yang lain. Jadi, harapan saya kepada Pak Menteri, sudilah kiranya untuk PJUTS ini dilimpahkan kepada PLN, itu satu.

Kedua, pada tanggal 26 Januari waktu kami rapat dengan Direktur PLN saya sudah memberikan proposal untuk PJUTS, untuk PLTS di Desa Tanjung Beringin dan Desa Tanjung Harapan Kabupaten Batu Ampar. Itu daerah itu sangat jauh karena melalui laut. Itu tidak pernah dapat aliran listrik ataupun PJUTS. Jadi, mereka mengharapkan bisa ada PLTS yang secara apa komunallah dilakukan di situ. Nanti Pak Dirjen EBT mungkin bisa melihat kepada proposal saya kepada PLN ataupun nanti saya sampaikan kepada Bapak juga tembusannya. Sehingga, itu menjadi rencana kerjalah untuk tahun ini atau tahun depan, sehingga daerah kami bisa mendapatkan aliran listrik.

Izin Pimpinan, bila diizinkan saya mendapatkan proposal dari teman saya Komisi X karena di daerahnya itu izin pertambangan sudah sangat tidak lagi masyarakat menginginkan karena banyak melanggar peraturan. Beliau itu di Komisi X, jadi tidak bisa memberikan aspirasi masyarakatnya kepada kementerian. Jadi, ingin saya untuk menyerahkan, saya izin ya Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dipersilakan Ibu Katherine yang terhormat.

**F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):**

Terima kasih.

Ini dari Bapak Profesor DR. Ir. Djohar Arifin itu Komisi X dari Sumatera.

**KETUA RAPAT:**

Begini Bu Katherine, disampaikan secara ini saja.

**F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):**

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Fotografer jangan lupa.

Ya, baiklah, tadi dari Ibu Katherine dari Gerindra.

Dilanjutkan dari Fraksi Nasdem, kalau enggak cukup. Saya sebentar menggarisbawahi hal tadi karena tercantum bahwa betul batu bara atau fosil batu bara akan dimanfaatkan salah satunya DME. Beberapa waktu lalu presiden meresmikan atau meletakkan batu pertama untuk produksi DME, tapi mohon dicatat Pak Menteri, jadi semuanya harus juga melalui mekanisme yang *clear*. Artinya juga dalam konteks *b to b*-nya juga harus dihitung. Kalau kita melihat dengan dipatok harga pembelian batu bara 15 dolar per ton. Sementara, ternyata kalorinya yang dipakai itu tidak seperti yang dulu diprediksi atau yang sudah kita hitung bersama dengan kalori rendah, ternyata kalori yang dipakai adalah kalori yang juga spek-nya PLN ini, tolong dikoreksi kalau salah. Misalnya, kalori 4000 memang ekuivalennya lantas tidak 6 ton menjadi kurang lebih 3-4 ton bisa menjadi 1 ton DME dan itu kan mohon maaf ya itu kan merugikan di satu sisi. Di sisi lain Pertamina di *pack* dengan harga beli, betul hari ini lebih murah dari harga dunia kurang lebih di *pack* dengan harga 500 sekian ya kalau tidak salah tolong dikoreksi.

Intinya adalah bahwa DME yang memang itu untuk pemanfaatan fosil yang memang di tahun 2030 ke atas kemungkinan sudah menjadi barang fosil juga, maka hari ini akan kita carikan teknologi untuk memanfaatkan. Tetapi juga jangan pula hari ini terlalu, kalau kita lihat sangat menguntungkan memang bagi misalnya air produk sebagai investor ke situ. Saya kira tetap nilai keekonomiannya harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi korban, mengorbankan di sisi lain di saat hari ini batu bara dengan gar 400 dan sebagainya saya kira sama-sama tahu dengan harga yang sangat tinggi.

Saya kira catatan itu saya selaku pimpinan menggunakan hak menyampaikan pendapatnya perihal tentang beberapa catatan.

Dilanjutkan dari Fraksi PKB? Kalau tidak ada Fraksi PKS Pak Mul? Oh Pak Sartono lupa terus saya ini.

Dipersilakan.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Ini ada hal yang perlu ada klarifikasi dengan Pak Sugeng ini, selalu anu ini.

**KETUA RAPAT:**

Selalu menengok ke sana biasanya ada di belakang Pak Sartono ini ada siapa.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):**

Rindu rendam ini kayaknya Pak Ketua ini, terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,  
Para sahabat Komisi VII, baik yang hadir secara fisik maupun yang *virtual*,  
Yang kami hormati Pak Menteri dengan seluruh jajarannya, senantiasa sehat terus ya Pak Menteri, Pak Dirjen *recovery*-nya cepat, hari ini kelihatan lebih cerah.

Terima kasih.

Setelah mendengarkan teman-teman tadi tentang DMO-DMO, betul saya pikir rekomendasi daripada panja, Pak Maman sudah disampaikan kepada kementerian yang Pak Maman ya dan yang jelas salah satunya ialah merekomendasikan agar pemerintah membentuk suatu entitaslah kurang lebih begitu, itu yang pertama.

Yang kedua, ini kembali lagi saya pikir untuk memperkuat tentang rekomendasi daripada Panja Komisi VII khususnya tentang pendapatan pertambahan pendapatan nilai tentang harga batu bara, acuan dan harga minyak mentah diprediksi akan terus menguat ini Pak. Tercatat di dalam harga batu bara acuan mengalami lonjakan sebesar 29,88 US dolar per ton pada bulan Februari 22. Ini membuat Februari mencapai USD188,38 per ton. Kenaikan tersebut salah satunya dipicu meningkatnya permintaan global atas kebutuhan batu bara. Oleh sebab itu, kira-kira proyeksi pendapatan negara pada sektor ini pada tahun 2022 ini berapa peningkatannya di-*compare* dengan pada tahun kemarin. Nah, ini kan tadi ada hubungannya juga itu tentang rekomendasi supaya tidak terjadi permasalahan kembali itu Pak yang tentang batu bara sampai apa itu terjadi langka waktu itu. Itu yang pertama.

Juga tadi sudah disampaikan juga oleh para sahabat tentang transisi energi. Ini kan masyarakat itu kan juga belum begitu paham betul itu Pak Menteri apa sih EBT-EBT ini. Itu terus terang aja ini apa kalau kita ke daerah dan sebagainya masih belum tahu juga tentang energi baru terbarukan itu iki *opo wae* sih Pak, itu kan. Itu yang terjadi. Saya pikir perlu sosialisasi yang lebih ditingkatkan dan *Insyallah* kami para anggota DPR khususnya Komisi VII akan ikut juga mensosialisasikan daripada EBT ini. Saya menyarankan itu

untuk program-program ini melibatkan banyak masyarakat begitu di dalamnya, dalam segi semua aspeklah, perencanaan mungkin, pelaksanaan dan *monitoring*. Sehingga, masyarakat tahulah begitu progresnya tentang EBT ini supaya tidak kaget gitu kalau nanti pada waktunya hal-hal yang lain dikurangin, di-stop masyarakat akan faham betul tentang EBT.

Kurang lebih itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Secara pribadi saya mohon maaf Pak Sartono atas perhatiannya karena di situ ada ini hari ini, dari kemarin juga nggak ada jadi agak khilaf. Sementara sebelah kiri ada Nasir.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

1 menit Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

1 menit ya? *Oke* silakan.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Izin Pak Menteri, menindaklanjuti yang disampaikan tadi Pak Maman tentang regulasi pengamanan dan pengawasan. Nah, kalau bisa segera bentuknya badan atau apa pun. Nah, ini kan yang paling banyak regulasinya ada Ditjen Minerba dan Ditjen Migas yang sering kecolongan dan kehilangan. Nah, kalau bisa segera panja atau apa bentuknya atau diskusi segera dibentuk antara kementerian dan komisi Pak Menteri, untuk merumuskan regulasi ini nanti supaya pengamanannya bisa dilakukan dengan baik gitu. Bentuklah badan atau apa *monggo* Pak Menteri, supaya pengawalan dan pengamanan ini bisa terbentuk dengan baik.

Tadi, saya sudah sampaikan Pak Dirjen, tapi kata Pak Dirjen jangan sampaikan di forum lagi, *oke*. Ya, sudah jadi saya sampai sini aja Pak Menteri.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kadang-kadang Pak Nasir ini.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Itu kan perlu disampaikan Pak Ketua karena kita kan nggak ada yang mau dibohongi-bohongi, ya kita sampaikan Pak Menteri, kan izin Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Cukup.

Iya, jadi selanjutnya PKS tadi Pak Mulyanto dipersilakan yang terhormat. Pak Mulyanto.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Banyak yang menyelak, harusnya secara tegas Pak Pimpinan bagi yang sudah terlalu sering yang sesuai putaranlah sehingga kita memiliki hak yang sama.

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

*Ala kulli haal* Pak Menteri, Pak Dirjen dan teman-teman yang lain *alhamdulillah* sudah sehat. Kami bersyukur sehingga bisa bersama-sama bekerja berkontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Baik, saya akan singkat saja Pimpinan ada beberapa pertanyaan.

Yang pertama, terkait izin pertambangan di desa Wadas ini dipertanyakan banyak pihak. Saya ikuti cermat betul, Kementerian ESDM mengatakan tidak ada izin atau tidak memberikan izin bersama. Namun, Dirjen Sumber Daya Air dari PUPR menyatakan tidak perlu izin. Saya baca di Undang-Undang Minerba dan turunannya PP terkait Minerba jelas izinnya itu adalah termasuk kategori Surat Izin Pertambangan Batuan itu diterbitkan oleh pemerintah pusat ya kan meskipun itu adalah proyek pemerintah, pemerintah daerah. Dia termasuk Surat Izin Pertambangan Batuan. Karenanya saya minta pemerintah berkonsolidasi lebih baik, jangan akhirnya *..(suara tidak jelas)..* soal ini, harus ditegakkan Undang-Undang Minerba dan PP yang ada, mohon dijelaskan Pak Menteri, satu poin.

Yang kedua terkait kenaikan BBM. Beberapa poin itu masyarakat sebagian bertanya melalui media. Ketika harga BBM turun pandemi, Pertamina tidak menurunkan harga itu dengan berbagai alasan. Sekarang ketika puncak Omicron ya kan harga merambat naik, langsung dinaikkan. Saya ingin

penjelasan sehingga masyarakat bisa menerima persoalan ini, kalau tidak kan mereka merasa keberatan.

Yang ketiga yang terakhir, saya sepakat dengan Ketua, Pimpinan Rapat kita bahwa terkait substitusi LPG ini, ini harus betul-betul dihitung, dikaji secara cermat komprehensif. Yang pertama dari aspek teknis efisiensi, yang kedua dari aspek keekonomian. Saya melihat kok DME ini belum tentu efisien dan ekonomis, termasuk juga program kompor listrik karena ..(*suara tidak jelas*).. dulu yang bersubsidi dinaikkan menjadi 2.200-lah ini kan menjadi kacau, dari bersubsidi menjadi tidak bersubsidi. Kami mohon agar terkait substitusi LPG ini 3 alternatif kita, apakah DME? Apakah kompor listrik? Atau Jargas? Kami melihat Jargas ini yang harusnya didorong.

Mohon Pak Menteri ini menjadi perhatian.

Demikian.

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya Pak Mul luar biasa. Jadi, bagaimana dengan mengatasi persoalan tingginya konsumsi LPG kita dengan substitusi dengan DME tadi. Saya kira kurang lebih sama ya tadi juga kami sampaikan.

Dilanjutkan kalau ada masih, saya kira cukup ya semuanya sudah memberikan pendalamannya. Dipersilakan Pak Menteri dengan berbagai catatan tadi untuk kembali menanggapi dan menjelaskan.

Dipersilakan Pak Menteri.

#### **MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan Komisi VII DPRRI,  
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Pertama, kami ingin merespons mengenai masalah DMO. Ya ini memang telah kita bahas waktu itu dikoordinasikan di Kemenko Maritim dan Investasi. Saat itu memang yang timbul wacana adalah adanya suatu badan pengelolaan tapi pelaksanaannya adalah memang minta waktu itu usulan dari produsen adalah PLN membeli dengan harga pasar, yang selanjutnya nanti akan dikompensasi dari iuran anggota. Tapi, kami melihat bahwa ini akan menyulitkan dari PLN, terutama dalam menyediakan modal kerja yang juga mempunyai *cost of money*. Tapi kalau tadi usulan untuk seluruh industri diberlakukan DMO per perusahaan, terus kemudian juga per harga dan selanjutnya nanti ini di apa di kompensasi berupa iuran gotong-royong. Saya rasa ini juga hal yang ide yang bagus dan kemudian ini akan kami angkat dalam rapat koordinasi karena rapat koordinasi itu melibatkan juga kementerian-

kementerian lain, antara lain juga keuangan. Jadi ini adalah satu masukan yang menurut kami cukup sangat *fair* untuk bisa memenuhi spirit daripada undang-undang mengenai *Domestic Market Obligation*. Jadi, ini akan kami sampaikan nanti di rapat koordinasi, koordinasi kami.

Kemudian, yang terkait dengan PJUTS ya Pak Nasir dan Ibu ya. Ini Pak Nasir anginnya lagi baik, terima kasih Pak Nasir.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ini *i like you* jadinya kan. *Thank you-thank you*, makasih, Pak.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Kata temen-temen yang di belakang, paten kali.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ini tadi Pak sebelum masuk, saya sudah banyak yang ngasih masukan. Jadi ikutlah *soft*-kan situasi, *oke*. Memang hari ini tensi darah pun turun, Pak. *Okelah*, ikut saja.

Terima kasih.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Terima kasih lagi Pak Nasir, paten.

Mengenai PJUTS ya sebetulnya kami juga sudah menawarkan ke PLN. Cuma memang mekanismenya yang, kami tidak keberatan cuma mekanismenya ini melibatkan juga perihal anggaran, dia *switching* daripada anggaran APBN untuk diserahkan kepada PLN. Jadi, ESDM tidak keberatan malah ini lebih apa.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Izin mungkin Pimpinan, 1 menit.

Pak, mungkin mengikuti regulasi waktu itu listrik desa saja, waktu itu waktu Pak Menteri sebelumnya kan sebenarnya APBN ini udah dikelola oleh PLN. Nah, mungkin pola itu bisa dilanjutkan untuk melanjutkan regulasi ini Pak, mohon izin Pak Menteri.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Jadi, kami akan tindak lanjut ya. Jadi, prinsipnya kementerian tidak keberatan dikelola oleh langsung oleh PLN karena juga nanti masalah *electricity* ini kan PLN yang paling mengetahui.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi sedikit, Pak Ketua.

Saya sebentar saja, Pak Menteri soal PJUTS mungkin itu tadi ide untuk pembangunan yang baru, tapi yang lama pemeliharannya juga saya pikir perlu juga kerja sama dengan PLN karena memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kathrine bahwa memang di dapil-dapil itu udah banyak juga PJUTS-nya yang rusak, memang di dapil saya sedikit masih karena selalu saya minta diawasi oleh tim-tim yang ada di sekitarnya.

Itu saja Pak Menteri, saya pikir untuk pemeliharannya perlu juga.

Terima kasih.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik.

Jadi, pada prinsipnya PJUTS ini selesai serah terima itu diserahkan kepada daerah untuk bisa melakukan program kelanjutannya karena itu yang memang menjadi adalah perjanjian antara kita dengan daerah.

**F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):**

Pimpinan bisa interaktif.

Pak Menteri apa yang disampaikan oleh Bu Katherine tadi sama Pak Ramson memang kenyataannya di lapangan itu Pak, baik yang PJUTS yang lama dan sekarang ini kelihatannya kita harus serahkan kepada ahlinya Pak. Ahli di bidang kelistrikan itu PLN Pak. Jadi, kalau kita kasih yang bukan ahlinya ini nanti ini barangnya jadi mubazir. Nanti jadi barang rongsokan Pak. Contoh di dapil saya Pak, ada yang sudah tidak menyala itu tiangnya malah mereka ambil terus dijadikan besi tua Pak karena di situ jarang pemda atau bupati dan jajarannya bisa berkunjung. Sehingga, begitu mati nggak ada yang bisa diperbaiki Pak. Tapi kalau PLN di pelosok-pelosok itu Pak sudah PLN masuk. Jadi saya pikir mungkin kita serahkan sama ahlinya supaya ini barang ini jangan jadi mubazir Pak, tiap tahun kita anggarkan tapi begitu kita serahkan kepada pemda, pemda berpikir ini bukan kami anggarkan, ini anggaran dari dirjen atau anggaran dari PLN atau kelistrikan jadi haknya PLN-lah.

Mungkin itu aja, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Yang penting begini Pak Menteri bahwa carikan mekanisme sedemikian rupa, tapi mungkin nanti juga dalam forum di sini nanti PLN kita mintakan menjadi semacam yang pertama. Memang betul perawatannya itu juga yang, tapi prinsipnya memang diterima nanti akan disampaikan kepada PLN *how to manage* dan sebagainya.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya Pak Willy, dipersilakan.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri. Pertama, menyangkut masalah izin galian C. Izin galian C ini kelihatannya sangat mendesak sekali di daerah, kebijakan yang harus diambil oleh pusat ya terutama untuk skala kecil galian C itu, itu pertama. Jadi, dikiranya ada kebijakan dari pusat yang segera merealisasi dari Undang-Undang Minerba.

Kedua, menyangkut PJUTS. PJUTS ini di daerah saya di Kalimantan Tengah ini ada bermasalah Pak Menteri. Bermasalah yang saya maksudkan itu adalah kontraktor atau subkontraktorlah seperti itu. Jadi, subkontraktor di daerah saya ini cukup nakal. Nah, jadi mereka ya vendornya itu tidak membayar sesuai dengan yang mungkin komitmenlah seperti itu. Jadi, ada beberapa ya PJUTS yang di daerah saya di Kalimantan Tengah itu dicabut oleh masyarakat. Dicabut itu otomatis rusak Pak. Maka oleh karena itu, saya ingin agar ini diatasi, terutama saya harus laporkan ke menteri untuk menyampaikan kepada dirjen atau direktur yang menangani ini, supaya kehormatan kita menjadi dipercaya oleh masyarakat.

Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Menambahkan beberapa catatan, Pak Willy.

**F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):**

Pimpinan, Pak Syaikhul.

**KETUA RAPAT:**

Pak Syaikhul Islam dipersilakan, PKB.

**F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajarannya,  
Sahabat-sahabat Komisi VII yang saya banggakan.

Menambahkan saja tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat di Komisi VII tentang DMO. Saya berpikir bahwa ada satu hal yang harus dilakukan untuk mencegah ya peristiwa yang kemarin terjadi itu supaya tidak terulang lagi yaitu transparansi pengawasan. Jadi, yang perlu kita lakukan di sini adalah transparansi dalam pengawasan DMO. Oleh karena itu, dalam forum yang terhormat ini saya mengusulkan untuk DMO ini harus apa namanya progresnya disampaikan lewat web atau situs Kementerian ESDM secara *online*. Jadi, kita bisa tahu perusahaan A sudah DMO berapa dan melakukan berapa banyak *export*. Sehingga, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kita di DPR tapi juga dilakukan oleh masyarakat. Ini yang mungkin jadi salah satu harapan kita bahwa untuk ke depannya bahwa tidak akan terjadi peristiwa kelangkaan batu bara seperti kemarin.

Oleh karena itu, saya secara pribadi memohon kepada Pimpinan yang terhormat agar kalau bisa ini dimasukkan dalam kesimpulan rapat pada siang hari ini bahwa *progress* DMO harus disampaikan oleh Kementerian ESDM secara *online* di situs Kementerian ESDM. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya kira tadi yang disampaikan sahabat kita Pak Mulyanto dari PKS itu perlu ya. Perlu ada pendalaman ini terkait penambangan batu andesit yang ada di Wadas itu. Saya justru agak aneh begitu ya ketika melihat ada peristiwa yang mengemuka secara nasional tapi kayak-kayaknya itu Kementerian ESDM tidak proaktif. Mestinya masalah tambang itu menjadi domainnya Kementerian ESDM dan saya berharap bahwa kita ya sebagai bagian dari pemerintahan ini punya tanggung jawab kepada negara dan rakyat untuk menjamin tidak ada perampasan hak-hak rakyat. Jadi, harus kita pastikan bahwa apa yang terjadi di Wadas itu satu tidak melanggar hukum, kedua tidak menindas dan merampas hak rakyat.

Saya kira 2 (dua) hal itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kita semua Pimpinan, para anggota, Pak Menteri dan jajarannya sehat *wal'afiat* dan mendapat perlindungan dari Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamit Thoriq.  
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabaratuh.*

Yang terhormat Bapak Syaikhul Islam dari Fraksi PKB, meminta ya menggarisbawahi perlunya keterbukaan informasi. Jadi, DMO di *web* secara *online* semuanya bisa mengontrol, bisa mengawasi. Saya kira ini yang bagus juga. Selanjutnya, tentang isu yang lagi hangat tentang Wadas. Wadas ini kebetulan kabupaten saya itu, Purworejo itu, saya lahir di Purworejo dan besar di Purworejo. Tentunya nanti ada forum-forum khususlah soal itu.

Ya, cukup, Bapak/Ibu sekalian?

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Pimpinan, ada satu tertinggal Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Siapa lagi ini.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Willy, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Willy karena ini udah jam 1 nih sudah 2 jam lebih nih kita.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Perpanjang dulu Pimpinan, 5 menit atau 10 menit.

**KETUA RAPAT:**

Saya perpanjang 1x15 menit ya, setuju Bapak/Ibu sekalian ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Ya, Pak Willy tapi mohon izin Pak Willy waktunya betul-betul diperhatikan karena kami sudah berinteraksi lebih dari 2 jam di forum ini.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Iya saya langsung ke Pak Menteri.

Ya, Willy Yoseph daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Pak saya minta tolong Pak Menteri sehubungan dengan listrik desa di Kalimantan Tengah, kami itu daerah yang paling tertinggal di Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah nomor urut 32 dari 34 provinsi. Sekitar 450 desa kami yang belum masuk listrik PLN, maka untuk itu saya minta kebijakan dari Pak Menteri melalui Dirjen Listrik kemudian ke PLN agar percepatan untuk melakukan elektrinisasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara percepatan, kalau perlu penugasan negara Pak ya karena kalau kita mengikut jalur yang ada saja itu kelihatannya kita baru ..(*suara tidak jelas*).. itu 2030. Sementara kita tahu bahwa listrik itu sangat memegang peran penting dalam kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka untuk itu kiranya ini menjadi catatan dan perhatian Pak Menteri untuk membantu Kalteng dalam listrikisasi di desa.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.  
Terima kasih Pak Menteri dan Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya jadi tentang listrik desa menjadi elektrifikasi. Ini lagi-lagi menyangkut tentang desa yang juga memang harus mendapat keadilan energi, begitu.

Dipersilahkan Pak Menteri ada beberapa hal yang perlu ditanggapi dan segera nanti kita akan sampaikan kesimpulan karena beberapa hal memang perlu tindak lanjut. Perlu rapat khusus membahas secara khusus tentang apa yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat. Tapi hari ini pada dasarnya memang karena ada faktor lain-lain tadi yang menjadi catatan. Jadi, memang hari ini ada agenda sebagaimana kita sampaikan tadi menyangkut tentang penyerahan hasil kinerja dari Panja PPN yang dengan berbagai ..(*suara tidak jelas*). Dipersilakan Pak Menteri.

#### **MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sampaikan lagi bahwa terkait dengan pembentukan BLU nanti kita juga sedang melakukan beberapa kegiatan, antara lain menginventarisasi ada 1.124 perusahaan batu bara yang dari produksi kecil sampai yang besar, kalau dia rendah spek sampai yang oh apa ..(*suara tidak jelas*)... Jadi, itu sekarang sedang kita lakukan pemilahan ya nanti ini akan juga tentu saja nanti akan dibahas mengenai nanti oleh tim gotong-royong, mengenai kewajiban-kewajiban yang harus digendong oleh masing-masing, masing-masing segmen tersebut. Nah, kemudian juga kita juga menyiapkan sistem informasi, ini juga nanti tentu saja bisa diakses ya yang akan memberikan laporan bulanan. Kemudian, laporan daripada ketibaan kapal di tiap-tiap *point of unloading* itu tiap hari bisa kita monitor karena PLN sudah memberikan apa, sudah menyampaikan sistemnya dan ini diintegrasikan dengan kita.

Ya, jadi pada saat, apabila satu perusahaan tidak dalam bulan tersebut, tidak menyampaikan, tidak memenuhi DMO-nya maka secara langsung dia izin ekspornya juga otomatis bisa diblok. Jadi, sistem kita lakukan nanti dalam kita coba juga nanti menggambarkannya dalam satu sketsa. Nah, kemudian juga saat ini sedang dibahas mengenai Simbara yang diprakarsai oleh Departemen Keuangan, antara lain ini juga untuk bisa memonitor jumlah barang dan kemudian juga PNBP yang harus bisa diperoleh oleh pemerintah, ini juga sedang paralel, sedang berjalan. Jadi, mengenai DMO ini betul-betul mendapatkan perhatian penuh dari eksekutif maupun juga dari legislatif dan juga kami sebagaimana tadi disampaikan kami juga sedang mengevaluasi mengenai segmen-segmen industri DMO yang memang berapa yang patut dikenakan harga-harga DMO-nya. Ini udah kita siapkan.

Kemudian, juga terkait dengan masalah FAME tadi. Masalah FAME ini sebetulnya sudah kita sampaikan ya dulu pernah di beberapa waktu yang lalu. Waktu itu ada keberatan dari BPPKS dan ini memang merupakan wewenang kewenangan nanti ada di, kita hanya menentukan tarif tapi penunjukan itu ada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Tentu saja hal ini akan kita bawa untuk bisa dibahas.

#### **ANGGOTA:**

Izin 1 menit Pimpinan.

Mungkin, ya jawab sebentar yang Pak Menteri tadi ini. Kalau FAME ini, kita nggak ikut, Pak. FAME-nya silakan karena keputusannya kan di Menteri Keuangan dan Perekonomian. Jadi, masalah angkutannya saja supaya regulasi Pertamina ini bisa kita *back up* kita pikirkan karena seingat saya juga saya waktu itu sudah disampaikan Pak Menteri juga mungkin itu saja yang mungkin dilepaskan dari regulasi itu karena kan ruhnya juga, FAME-nya Pertamina yang kelola menjadi G30. Nah, mungkin pengangkutannya mereka kewalahan. Jadi, mereka sampaikan kalau bisa kami saja Pak karena kami yang mengelola ini semua gitu, mungkin itu Pak Menteri, tujuannya di situ. Jadi, untuk pengangkutannya saja tapi regulasi untuk soal FAME-nya tidak mencampuri.

Mungkin itu Pak Menteri, garis bawah.

Terima kasih.

#### **MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, nanti kami akan sampaikan dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian.

Kemudian, yang tadi terkait dengan Wadas, isu yang sangat menarik perhatian saat ini. Itu sebetulnya izin itu diberikan kepada PUPR, kita dalam hal ini tujuannya adalah untuk pembangunan bendungan, bener, bener di Purworejo dan ini memang masuk dalam program rencana PSN dan diprakarsai oleh dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Maka

mengingat ini untuk kepentingan nasional disampaikan PUPR bahwa material batu dari *quarry* yang ada tersebut di desa Wadas, dari jenis andesit diproduksi hanya untuk keperluan dukungan material proyek, tidak untuk dikomersialkan. Nah, mengenai eksekusinya ini tentu saja barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu mendapat perhatian. Sehingga, tidak menyebabkan terjadinya protes yang eksekusif. Jadi, tidak ada didirikan izin pertambangan kan.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak Mul.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Ya sedikit, Pak Menteri.

Bukankah di dalam Undang-Undang Minerba dan PP-nya itu ditegaskan bahwa untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah sekali pun izinnya berupa SIPB. Jadi, harusnya diterbitkan oleh pemerintah SIPB itu, mohon ketegasan kalau memang benar perlu izin sama sekali sesuai dengan Undang-undang Minerba di dalam PP-nya.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya bisa ditanggaapi Pak atau Pak Dirjen Minerba akan menambahkan lebih aspek dalam lagi.

**DIRJEN MINERBA ESDM (RIDWAN DJAMALUDIN):**

Izin Pak Menteri, Pak Ketua terima kasih Pak.

Pak Mulyanto, pertama sudah disampaikan Pak Menteri menurut regulasi yang ada izin diberikan kepada badan usaha. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR tidak memerlukan izin apalagi digunakan untuk keperluan sendiri. Tanggung jawab lingkungan dan pajak-pajak yang lain diserahkan juga kepada Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab kegiatan. Hal ini juga dihubungkan dengan koordinasi antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah.

Terkait dengan Pasal 9, eh PP 96 yang Bapak sampaikan, SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perorangan.

Demikian penjelasan kami, Pak.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Pimpinan, interupsi.

Saya belum puas karena saya baca di situ jelas bahwa yang dimaksud SIPB itu adalah dua, untuk batuan tertentu yang bersifat terapung tidak dalam. Yang kedua adalah untuk proyek pemerintah atau proyek pemerintah daerah. Saya ingin jawaban tertulis kalau gitu Pimpinan, supaya ini jelas dasar-dasar hukumnya.

Demikian.

**KETUA RAPAT:**

Oke, ya terima kasih menjadi jelas Pak Dirjen, Pak Menteri nanti dijawab secara tertulis dengan *reasoning* yang tajam dengan berbagai hal, termasuk apa yang disebut dengan proyek strategis nasional karena kalau tidak salah, betul ada dalam PSN itu juga ada apa istilahnya, diskresi-diskresi tertentu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas dengan jawaban tertulis.

Terima kasih.

Dilanjutkan Pak Menteri.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, Bapak Pimpinan.

Jadi, kami sampaikan juga mengenai transisi energi. Ini memang kita agak terdesak dengan target RUEN tetapi kita sudah meng-isu Permen PLTS atap *roof top*-nya itu kita harapkan 2025 3,6 gigawatt bisa *install*, termasuk juga rencana untuk penambahan dari RUPTL. Nah, kami juga ingin merespon jawaban Pak Willy, ya kami sangat memperhatikan daerah-daerah untuk bisa mendapatkan *electricity*-nya. Untuk itu, untuk wilayah Kalteng ini Pak ya mungkin kita akan berbicara dengan PLN ya untuk bisa mengakselerasi program-program kelistrikan yang ada di RUPTL untuk wilayah Kalimantan. Ini nanti akan kita coba bahas.

Nah, terkait dengan substitusi LPG dengan DME kita memang memiliki beberapa alternative. Ya pertama dengan Jargas kemudian juga dengan elektrifikasi, kemudian juga antara lain dengan hilirisasi batu bara yang memproduksi DME ini. Batu bara yang dipakai di sini adalah yang berkalori 3.800 yang mana tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan PLN dan juga dilakukan di lokasi mulut tambang ya. Jadi, memang tidak mengangkut sejumlah sekian juta ton batu bara tetapi nanti berupa produk *processing*-nya aja. Nah, ini akan memudahkan ya. Kita sudah melakukan perhitungan keekonomian dan sudah disepakati satu harga keekonomian yang memang bisa meng-*compete* harga LPG. Nah, paling nggak ya benefit yang kita dapat adalah kita bisa

memanfaatkan sumber daya alam kita. Kemudian, kita bisa menghemat devisa impor dan kemudian kita bisa memenuhi in situ apa di lokasi. Dalam hal ini memang yang proyek pertama ini akan dilakukan di daerah Sumatera. Di mana lokasi pabriknya di mulut tambang di Sumatera sehingga kita bisa mempercepat kerja isunya terjadinya kelangkaan.

Mengenai efisiensi DME sendiri dibandingkan LPG efisiensi pembakaran DME itu lebih baik dibandingkan dengan LPG karena di dalam botolnya itu dari percobaan kurang lebih 200 percobaan yang dilakukan oleh Lemigas itu fraksi karbon beratnya kalau di LPG masih tertinggal di dalam sisa botol. Sedangkan kalau DME itu bisa dioptimalkan. Jadi, ini salah satu *advantage*.

Nah, Bapak Pimpinan, juga mengenai pengetahuan EBT tadi yang disampaikan oleh Pak Sartono. Kita tahun lalu sudah mengirimkan program patriot energi, di mana kita mendidik 100 anak muda itu kita didik mengenai EBT dan mereka disebar ke 198 titik, umumnya di wilayah-wilayah terpencil, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Maluku untuk mengidentifikasi potensi-potensi EBT yang ada sekaligus juga melakukan sosialisasi. Ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan kita memang dengan data-data informasi tersebut kita bisa menyusun program elektrifikasi daerah-daerah terpencil dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada di sana.

Bapak Pimpinan,  
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI,

Kalau diperkenankan nanti sisa daripada pertanyaan ini akan kita lengkapi dalam jawaban tertulis kami.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok tadi yang telah, isu yang apa yang krusial dan harus segera kita tindaklanjuti.

Terima kasih atas perhatiannya.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya.

Jadi, demikian tadi Pak Menteri menjelaskan berbagai pendalaman dari anggota yang terhormat, menyangkut berbagai hal, menyangkut DMO, DME dan juga PJUTS dan yang lain-lain. Bahwa hal-hal yang belum disampaikan oleh Pak Menteri nanti akan dijawab secara tertulis sesuai dengan pertanyaannya anggota Dewan yang terhormat.

Saya kira cukup ya sekali lagi menyangkut waktu juga sudah 2,5 jam bahkan tadi sudah kita perpanjang. Untuk itu marilah kita cermati bersama tentang kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPRRI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terpampang di layar ini.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPRRI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kamis 17 Februari tahun 2022:

1. Komisi VII DPRRI dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sepakat untuk membentuk, untuk mendukung pembentukan entitas khusus yang bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar batu bara untuk domestik dan harga patokan *domestic market obligation* yang sekarang ini ditetapkan 70 dolar per ton. Entitas khusus tersebut dibuat guna memenuhi DMO batu bara, baik dari jumlah tonase maupun *revenue* melalui skema gotong-royong, dengan fungsi:
  - a. Menjaga ketahanan cadangan dan stabilitas harga batu bara;
  - b. Meningkatkan dan mengikat kontrak batu bara yang memiliki spesifik sesuai kebutuhan domestik;
  - c. Menggalang dana iuran untuk kegiatan ekspor dengan subsidi silang dan gotong-royong;
  - d. Memastikan PLN untuk tidak membeli batu bara dengan harga pasar melalui skema gotong-royong yang berasal dari entitas khusus batu bara;
  - e. Meningkatkan realisasi target RKAB dari perusahaan;
  - f. Meningkatkan PNBPN dan beberapa pajak turunan melalui adanya peningkatan target produksi dengan memperhatikan kondisi pasar.

Bagaimana, kesimpulan pertama?

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII):**

Pimpinan, kalau tidak salah pada rapat terdahulu Pimpinan menyampaikan untuk peningkatan DMO dari 25% menjadi 30%, masuk di poin mana nih Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Betul sekali, saya minta kesepakatan juga di forum ini apakah itu setuju? Ya, memang setuju kan?

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Sama tambahan aja Pimpinan itu yang harga patokannya 70 dolar kita nggak usah masukin kali ya, harga patokan DMO aja, gitu aja karena kan harga DMO kan ada yang untuk pupuk, segala macam. Jadi itu aja. Terima kasih.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Untuk dalam negeri antara lain energi dan industri.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ya udah pas itu yang dibilang Pak Menteri itu.

Begini dari atas dulu nih, naik dulu ke atas harga patokan DMO dalam tanda kurung untuk sektor energi dan industri lainnya gitu ya dan industri lainnya. Nah terus yang tadi yang poin a, b, Pak Gunhar yang 30% ya itu di poin sendiri aja, di e, mungkin tambahkan di mana ya, di g? Oke poin baru.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII):**

Pak Ketua, kalau bisa itu poin 2 aja, khusus. Terus yang d memastikan keamanan ketersediaan energi primer batu bara untuk seluruh pembangkit listrik milik PLN dan yang dikelola PLN, artinya yang IPP karena itu yang menyediakan juga PLN. Memastikan keamanan ketersediaan energi primer batu bara untuk seluruh pembangkit listrik milik PLN dan yang dikelola oleh PLN karena IPP itu diasumsikan dikelola PLN soal pengadaan batu baranya. Dengan jaminan tadi memastikan keamanan dan ketersediaan energi batu bara dengan harga yang sesuai keputusan DMO. Artinya, kebijakan pemerintah seperti tadi mungkin bisa aja USD 70 bisa aja lebih turun saya pikir sampai titik itu aja Pak Ketua.

Kalau usul Komisi VII saya pikir tersendiri di poin 2 aja usul saya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, coba apakah di g atau di point 2 bahwa intinya begini kebetulan waktu ini sudah rapat bahwa kebutuhan ..(*suara tidak jelas*).. dipastikan akan meningkat. Kebutuhan batu bara dipastikan akan meningkat baik untuk keperluan PLN maupun industri, diperkirakan tidak akan cukup dengan 25%, kenapa? Bayangkan kalau listrik kurang lebih yang program 35.000 megawatt yang akan naik kurang lebih sekian giga saja itu memerlukan sekian juta karena 1 giga itu kurang lebih 6 juta ton setahun, belum untuk kepentingan industri. Sehingga waktu itu adalah bagaimana kalau DMO dari 25% menjadi 30%.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, Pak Ketua.

Saya pikir TA udah bisa memformulasikan pemikiran brilian dari Pak Ketua Rapat karena kalau dimasukkan ke a, b, c, d coba dinaikkan ke atas TA, itu kan dengan fungsi. Jadi, fungsi dengan usulan itu beda dong iya gitu, poin 2, gitu Pak Gunhar yang terhormat.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Mengusulkan atau menjadi minimal 30%. Nanti ketetapannya.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

TA, Pak Ketua interupsi bisa saya bantu TA-nya.

Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDM untuk meningkatkan kewajiban DMO yang semula 25% menjadi minimal 30% atau kalau sebelumnya supaya lebih enak alasannya untuk keterjaminan ketersediaan batu bara untuk, untuk ketersediaan, terjaminnya ketersediaan batu bara di dalam negeri baik untuk pembangkit listrik maupun untuk industri, Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDM untuk meningkatkan kewajiban DMO yang semula 25% menjadi 30%. Jadi tolong TA, sebelum komisi untuk terjaminnya ketersediaan batu bara.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Pak Ramson, Pak Ramson, ini kalau kita runut dari yang poin pertama itu udah nyambung itu. Poin pertama terus butir-butirnya sampai f. Nah, yang kedua ini udah pas ini, udah tutup ini.

Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk meningkatkan kewajiban DMO yang semula 25% menjadi 30% udah cocok, nggak usah tambah lagi. Nanti panjang kesimpulannya.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Kalau mau dipanjangin kita buat alasannya, tahu-tahu rupanya nggak mau yang panjang.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Udah cocok, udah cocok.

**KETUA RAPAT:**

Oke, sepakat ya saya kira substansinya sudah masuk jadi itu, sepakat ini ya dengan poin 2 ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

3. Komisi VII DPRRI mendorong Menteri ESDM untuk segera menyiapkan rencana detail termasuk operasional dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program transisi energi.

Saya kira ini kan *encourage* apa, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

4. Komisi VII DPRRI mendorong Menteri ESDM untuk berkonsultasi secara reguler dengan Komisi VII DPRRI dalam persiapan dan penyelenggaraan forum transisi energi G20 tahun 2022.

Oke? Ini usulan Ibu Roro salah satunya dan usulan kita semuanya, ya intinya di antara kita saling terus menerus.

**ANGGOTA:**

Izin, Pimpinan,

Tambahan poin 1 dan lain-lain tadi belum masuk ini poinnya, ini masih DMO aja permasalahan sama yang poin 4 tadi.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya kira setuju Pak Menteri ya, kalau dalam G20 itu kita selalu berkoordinasi, selalu saling itu aja intinya di poin 4 itu.

**(RAPAT : SETUJU)**

5. Komisi VII DPRRI mendorong Menteri ESDM agar pelaksanaan program PJUTS dapat diserahkan kepada PT PLN persero dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**(RAPAT : SETUJU)**

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Nah ini sebelum ini.

**KETUA RAPAT:**

Poin 6, oh menyampaikan jawaban tertulis.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Sebelum ini Pimpinan, jadi diminta untuk membuat jadwal oleh Pertamina dan dari Kementerian ESDM menjadwalkan untuk pembahasan pengangkutan FAME tadi dibahas di Komisi VII gitu.

**KETUA RAPAT:**

Apakah ini juga menjadi agenda internal saja.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Nggak..(suara tidak jelas)...Pimpinan, kesimpulan, ya menyelesaikan masalahnya.

**KETUA RAPAT:**

Iya begini, saya kira kita substansinya kita memang menginginkan ke sana tetapi supaya tidak apa ya. Meskipun, memang ada catatan karena lain-lain tadi. Jadi, ini akan menjadi agenda internal tapi perlu dimasukkan dalam kesimpulan.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ya disampaikan dalam kesimpulan, Komisi VII akan menghadirkan Pertamina dan Kementerian ESDM untuk pembahasan tentang pengangkutan FAME.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII):**

Begini Pimpinan,

Saya pikir ini kan sudah menjadi komitmen kita bahwa nanti kita agendakan Pak Nasir. Tapi saya rasa tidak usah kita masukkan dalam kesimpulan ini karena nanti akan bias antara isu besarnya karena ini kan teknis sekali ini pengagendaan ini. Jadi, saya rasa ini komitmen kita bersama saja nanti teman-teman fraksi untuk mengagendakan tentang FAME ini.

**ANGGOTA:**

Pimpinan, begini Pimpinan waktu kita rapat dengan Mind-ID kita akan membuat juga jadwal pertemuan Pongkor gitu. Itu enggak masalah kalau menurutku. Jadi, kita buat aja. Jadi, kalau kita buat kita masukkan poin pada pertemuan itu agenda berikutnya kita rapat berdasarkan kesimpulan ini. Tapi kalau kita tidak masukkan dalam satu kesimpulan, apa yang mau kita kerjakan lagi rapat untuk tindak lanjutnya, seperti itu Pimpinan.

**ANGGOTA:**

Begitu Pimpinan, Pimpinan ini menjadi Pimpinan yang arif dan bijaksana. Silakan dimasukkan Pimpinan.

**ANGGOTA:**

Pak Ketua, tidak apa-apa Pak Maman nanti kita tinggal bicarakan kan antara, Pak Maman kok agak kesinggung sini, sininya. Udah masukkan nggak apa-apa. Ini kan masalah penyampaian yang akan dirapatkan, menurut saya udah betul itu.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Atau begini Pak Ketua, interupsi.

Pertama, sebenarnya catatan Pimpinan itu udah bisa nanti dimasukkan di dalam *draft schedule* rapat-rapat periode yang akan datang. Tetapi karena

yang terhormat Pak Gunhar sama Pak Nasir saya pikir jangan meminta Menteri ESDM menyampaikan ...(suara tidak jelas)... Sebentar dulu Pak Nasir, Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan laporan dan data-data mengenai pengangkutan itu sampai FAME itu dengan mengikutsertakan PT Pertamina Persero. Jadi, terkait dengan raker ini, jangan kita mendesak jadi meminta menteri untuk menyampaikan laporan pada rapat berikutnya gitu.

**ANGGOTA:**

Dan menjadwalkan rapat.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Ya, itulah kalau udah dibuat pada rapat berikutnya otomatis sudah tanggung jawab Komisi VII untuk melanjutkannya. Itu logikanya. Jangan terlalu teknis kita, waduh. Ini Komisi VII ini hebat dari dulu sampai sekarang, sampai nanti-nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Begini Pimpinan, saya tetap menganggap begini ini *out of context* dari pembahasan isu besar kita setuju bahwa menjadi agenda yang memang perlu kita bahas. Saya pikir kita ini kan bukan anak kecil, Bos. Saya bingung kok jadi kayak dibikin dagelan, prinsip dasarnya kan kita setuju bahwa FAME kita perlu memanggil dan mengagendakan, memanggil Pertamina untuk membahas mengenai FAME. Tapi, bahwa akhirnya ini kita masukkan menjadi sebuah kesimpulan yang poin intinya adalah membahas mengenai DMO. Substansi rapat hari ini, agendanya ini adalah membahas mengenai entitas khusus yang direkomendasikan oleh Panja PPN.

Maksud saya kalau kita masuk kepada agenda pembahasan FAME terlalu jauh jadinya. Tapi, kita sepakat jadi walaupun misal mau nanti pas reses pun kita agendakan ya kita agendakan saja. Tapi, kalau ini kita masukkan dalam kesimpulan poin yang paling utama bagi saya adalah kita mau mengangkat isu besar mengenai entitas khusus. Tapi, lalu kalau kita masukkan lalu isu FAME dalam kesimpulan rapat ini kan nanti jadi bias. Kalau saya sih prinsip dasarnya adalah setuju saya bahwa ini kita agendakan, tapi kalau ini dimasukkan dalam kesimpulan bias nanti.

Itu saja Pimpinan, jadi saya rasa.

**F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):**

Izin, Pimpinan.

Jadi, saya sependapat dengan Pak Maman karena beliau ini kan Ketua Panja Pendapatan Negara. Ini untuk pendapatan negara yang kita masukkan

ini, sangat-sangat setuju saya. Jadi, pembahasan tadi kan pembahasan poin DMO dan lain-lain. Nah, ini diakomodir dalam kesimpulan untuk mendapatkan pemasukan negara yang baik buat negara kita. Jadi, Pak Maman sebagai ketua udah bener, jadi nggak ada masalah sebenarnya karena yang kita bahas untuk pemasukan negara gitu.

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Memang ini menyangkut tentang poin ini apakah masuk dalam kesimpulan rapat hari ini atau tidak. Sejauh yang kita baca Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan laporan dan data-data pengangkutan FAT ya pokoknya FAME ya terus bersama PT Pertamina Persero dalam rapat yang akan datang.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Sedikit Pak Ketua interupsi, teknis saya ke TA dengan mengikutsertakan PT Pertamina persero, jangan bersama gitu TA. Jadi, Menteri ESDM dengan Pertamina juga koordinasi sebelum kita raker lagi gitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya, persoalannya kemudian adalah apakah ini akan masuk dalam kesimpulan ini gitu loh, sedangkan.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Ya, udah mungkin begini Ketua, *okelah* ini kita drop dulu, entar, entar dulu, sabar dulu.

**ANGGOTA:**

Maksud saya gini loh Pimpinan.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Nggak kita sesuai aja dululah dengan agenda, nggak, udahlah, kita ini bos udahlah bos jangan kita ini bukan paham sama pahamlah kita ini urusan. Tapi, maksud saya, saya ingin kita ini fokus dulu pada substansi urusan kita. Kalau kita akhirnya hanya berdebat kepada sesuatu yang tidak substansi, akhirnya nanti panjang. Poinnya kan adalah kita ingin mengagendakan pembahasan mengenai FAME, nggak ada masalah kita agendakan dan itu kan menjadi ranahnya nanti di agenda rapat pimpinan nanti sama internal. Tapi maksud saya, kalau bahwa dalam rapat ini kita keluar dari konteks

pembahasan, masuk kepada agenda dan kita masuk ke kesimpulan menjadi bias. Itu aja poinnya Pimpinan. Jadi, saya berharap dengan segala kerendahan hati kita sama-sama memahami bahwa poin terkait agenda FAME ini kita drop aja dulu, kita agendakan, intinya kan permintaannya apa, permintaannya kan pengagendaan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, sepakat kita Pak Maman, kita drop dulu, kita agendakan setelah rapat ini ya.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Begini Pimpinan, saya Fraksi Demokrat minta catatan ini di bawah. Fraksi Demokrat minta catatan dijadwalkan ini.

**ANGGOTA:**

Menjadi catatan.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Iya menjadi catatan Fraksi Demokrat.

**KETUA RAPAT:**

Itu yang akan saya usulkan.

**F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Iya saya tahu, kalau Pimpinan itu bijak dan bijaksana, silakan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi catatan, bukan catatan saja ini catatan rapat saja. Jadi menjadi catatan di bawah.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Fraksi Demokrat nggak apa-apa, jadi biar Pak Maman jelas bahwa kita nggak ada bias kanan bias kiri.

**KETUA RAPAT:**

Catatan itu.

**ANGGOTA:**

Itu mengagendakan kan, kalau data-data kapal ini kita nggak punya karena kita nggak memonitor, karena kita adalah bagian daripada kebijakan B30, antara lain ya menentukan proses FAME, kemudian tarif, jadi.

**KETUA RAPAT:**

FAME yakni dengan, ada asosiasi nggak itu, ada asosiasi selain Pertamina ya.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ditjen Migas itu ya, izin Pak Menteri ya, Ditjen Migas yang regulasinya, ya, iya kan.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Di EBTKE.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Oh iya ya ya, dua-dualah itu sama Pak Dirjen Migas kan, regulasinya kan ya Pak.

**ANGGOTA:**

Izin Pak Menteri, Pimpinan, nomor 1c Pak. Itu ada iuran, kata-kata iuran yang mensyaratkan dasar tertentu Pak, iuran itu seperti pajak, iuran dan lain-lain itu harus mensyaratkan undang-undang.

Kalau boleh saya usul, kita tidak menggunakan kata iuran di situ Pak, tapi lebih kepada mendukung penggalangan dana untuk mengkompensasi selisih harga antara penjualan ekspor dan penjualan dalam negeri Pak, iurannya saja yang sensitif.

**ANGGOTA:**

Mungkin ada juga, ada pemikiran BLU berkewajiban untuk menutup selisih antara harga pasar dengan harga DMO.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Untuk mendukung penggalangan dana untuk menutup selisih antara harga ekspor dan harga dalam negeri, Pak.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, Pak Ketua.

Saya pikir lebih bagus dengan harga DMO karena DMO itu kan ada ketentuan kebijakan Menteri ESDM untuk menentukan siapa dengan harga yang mana kan tidak disamakan semua gitu harga dalam negeri, kan ada *protect* itu ke mana dulu kan gitu. Tapi *volume* memang harus di *protect* oleh Kementerian ESDM melalui kebijakan Pak Menteri.

**ANGGOTA:**

Izin Pimpinan, ini mungkin rumusnya silakan seperti apa bahasanya tapi nanti kan ada rumusan gotong-royong yang dirumuskan, mungkin di situ nanti bisa lebih detillah gitu Pimpinan, gitu kan Pimpinan cocok kan, Pak Maman cocok kan, nanti secara detil dirumuskan, itu, itu kan itu, betulkan kan Pak Maman, nah itu, nah ya kan Pak Menteri.

**ANGGOTA:**

Itu kan redaksinya dari Pak Ridwan, nggak, konkrit aja Pak Ridwan.

**ANGGOTA:**

Jadi mendukung penggalangan dana untuk menutup selisih harga DMO dan harga pasar, atau ditambahin juga nih untuk mengkompensasi perusahaan yang melaksanakan program DMO.

**KETUA RAPAT:**

Konkrit begini mendukung penggalangan dana untuk menutup selisih antara harga DMO dan harga pasar dengan skema gotong-royong. Apa tadi Pak?

**ANGGOTA:**

Untuk mengkompensasi.

**KETUA RAPAT:**

Dalam rangka untuk mengkompensasi.

**ANGGOTA:**

Badan usaha yang memenuhi yang berkewajiban DMO.

**KETUA RAPAT:**

Dalam rangka untuk mengkompensasi badan usaha yang melaksanakan pemenuhan kewajiban DMO.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Ini bagusya nanti aja Pak Maman, lebih disempurnakan. Iya, iya maaf Pimpinan ya, *oke, oke*.

**KETUA RAPAT:**

Begitu ya, betul, semakin tegas memang jadi semakin fungsinya apa, ini juga apa fungsinya ini lembaga atau badan khusus ini juga menjadi lebih jelas.

Saya kira ini udah selesai bagian atas, oh memungut iuran, menggalang dana.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Menggalang dana ini nanti untuk kampanye Pak, ga salah ini. Memungut ajalah udah betul itu Pak Menteri.

**ANGGOTA:**

Nggak boleh bahasanya beda.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Yang menggalang itu bahasanya beda Pak, saya tapi masukan aja sih kalau mau dimasukkan ya silakan. Kalau menggalang itu iya bener orang mau ngasih berapa aja gitu, tapi kalau iuran itu udah bener Pak dipatok gitu. Jadi, positif dalam sesuai undang-undang gitu, nggak usah menggalanglah, kalimatnya kurang enak, Pak.

**ANGGOTA:**

Kalau sukarela sih nggak paslah, orang mana mau kasih sukarela, jadi jangan menggalang, memungut dana sesuai dengan peraturan yang ada aja.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Izin Pimpinan, cocok Pak Maman, kan.

**ANGGOTA:**

Begini, begini Pak kalau menggalang dana atau memungut iuran atau apa pun bentuknya itu di bawah Peraturan Menteri Keuangan nggak boleh ya kan. Nah, tapi kalau dibiaskan seperti ini dengan ketetapan kementerian atau dirjen itu bias. Artinya, kesepakatan antara asosiasi penambang batu bara dengan Ketua Kadin untuk melakukan skema gotong-royong dalam konteks entitas khusus tadi.

**ANGGOTA:**

Interupsi, mengumpulkan dana aja udah, mengumpulkan jangan menggalang, menggalang agak politis.

**ANGGOTA:**

Politis itulah kita ambil di ruangan ini.

**ANGGOTA:**

Maksud saya.

**ANGGOTA:**

Kalau kita putuskan iuran ya atau memungut lebih salah lagi, kalau mengalang kan bias.

**ANGGOTA:**

Mengumpulkan dana aja.

**ANGGOTA:**

Iya, ya *oke, oke*. Saya pikir mengumpulkan itu jauh lebih ini ya, prinsipnya kan gini Pak Menteri sebetulnya terkait entitas khusus ini kan, kalau, nggak ini kalau sekedar nanti jadi bahan pertimbangan teman-teman di ESDM aja. Sebetulnya ini hanya PR yang paling utama adalah meredefinisikan definisi dari DMO aja sebetulnya, kalau saya menangkap begitu karena di aturan, di undang-undang kita itu kan hanya bunyi mengenai terkait kebutuhan dalam negeri. Artinya kalau misalnya terkait kebutuhan dalam negeri, ini kan tergantung kementerian mendefinisikan apa sih kebutuhan dalam negeri itu. Jadi makanya poinnya nanti itu aja Pak Menteri.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Izin, maksud saya pengembangan berikutnya nanti di dalam tim gotong-royong itu aja Pak Maman. Maksud saya udah gini saja kesepakatan gitu cukup atau kalau mau ditambahkan iuran saja, nanti kalau klausul lahirnya seperti apa *monggo* gitu aja.

**ANGGOTA:**

Itu berarti yang c diganti mengumpulkan tuh mengumpulkan dana.

**ANGGOTA:**

Jadi kita pakai kata penggalangan, mengumpulkan atau pungutan.

**ANGGOTA:**

Mengumpulkan.

**ANGGOTA:**

Sebetulnya pungutan aja, memungut dana gitu aja ya.

**ANGGOTA:**

Iya memungut iuran dana, iya iurannya harus ada, gitu loh.

**KETUA RAPAT:**

Ini persoalan istilah ini, persoalan semantik, sebetulnya ya.

**ANGGOTA:**

Sebetulnya begini, izin Pimpinan.

Ini kan bicara ada frasa-frasa mungut atau iuran, ini kan kalau ada pungutan atau iuran ini irisannya ke Kementerian Keuangan peraturan. Tetapi kalau kita menggunakan kata menggalang ini udah bukan ranah mereka begitu loh. Nah ini kesepakatan dari asosiasi dengan pengusaha-pengusaha tadi seperti itu, nanti kalau kita pakai iuran, pakai apa pungutan bisa ya berakibat hukum nanti kita munculnya.

**ANGGOTA:**

Mendukung penggalangan dan pengumpulan dana itu.

**ANGGOTA:**

Itu Pak Ketua, kalau udah begini harus lebih rinci, harus.

**ANGGOTA:**

Mengumpulkan iuran dana, gitu aja.

**ANGGOTA:**

Harus terperinci kalau nggak nanti salah bahasanya juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi, mengumpulkan dana dari pengusaha batu bara yang tidak melaksanakan kewajiban DMO secara penuh, kan itu yang mau dipungut itu kan. Jadi, misalnya dia punya kewajiban misalnya 5 juta ton tau-tau yang direalisasikan 3 juta ton, kan 2 juta tonnya selisihnya itu, itu yang mau dipungut kira-kira begitu saya pikir ya Pak Menteri ya.

**ANGGOTA:**

Kalau dari sisi, izin Pimpinan. Izin.

Kalau dari sisi saya tidak begitu sebetulnya karena pendekatan saya ini, pendekatan kita Pak Ramson kita samakan dulu ini ya. Pandangan kita semua badan usaha yang bergerak di urusan batu bara itu wajib menjalankan DMO. Artinya berarti sebetulnya tinggalkan selama ini bahwa DMO itu kita artikan dalam bentuk tonase, oh 25% itu produksi kalian 100.000 25%-nya berarti 25.000 kan begitulah kurang lebih. Tetapi hari ini kita menambahkan 1 poin sebetulnya bahwa selain pungut DMO itu tonase kita tambahkan adalah *revenue*. Maka dari itu dibutuhkan sebuah ada redefinisi aturan seperti permen atau nanti kalau memang ternyata secara aturannya perpres ya berarti itu. Tapi poinnya adalah meredefinisikan definisi dari DMO, artinya apa? Menyambung tadi yang dibilang oleh Pak Ramson jadi sebetulnya pungutan dana ini adalah resmi kalau tadi sudah diredefiniskan karena definisi DMO itu kan tidak hanya lagi sekedar tonase, tapi adalah *revenue*. Nah detail teknisnya seperti apa *monggo*, tapi ini kembali lagi ini hanya kata-kata mengumpulkan, pungutan atau penggalangan.

Saya pikir, saya lebih merasanya pungutan, jadi bertugas memungut dana dari badan usaha tapi bukan pengusaha ya, itu semua kata-kata jadi badan usaha. Jadi kalau pengusaha kesannya nanti, nah memungut dana gitu aja dari badan usaha batu bara.

Saya pikir cukuplah.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Sedikit, interupsi Pak Ketua.

Jadi, begini kan Pak Ketua bahwa tidak semua perusahaan batu bara merealisasikan DMO. Mungkin mereka banyak yang mengandalkan pasar domestik biarpun harga DMO, kalau itu artinya dia harus jual harga pasar misalnya contohnya kayak PLN atau PT Pupuk misalnya baru ditagih lagi selisihnya. Saya pikir itu agak birokratis Pak Menteri. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah kewajibannya ada ketentuan *volume* tertentu tidak merealisasikan, itu yang harus menyerahkan. Jadi, itu lebih baik seperti itu karena kalau nggak, kan harus dibayar dulu oleh PT Pupuk contohnya atau PLN dengan harga pasar yang tinggi. Uangnya masuk dulu ke sana baru ditarik lagi dibayar oleh BLU selisihnya. Ini kira-kira bagaimana harus perlu kita pikirkan juga operasionalnya kira-kira aplikatif nggak kan begitu ke peraturan itu karena jangan hanya kita membuat peraturan maaf aja, tetapi sulit aplikasinya. Tapi, kalau ini kan memang ada perusahaan-perusahaan batu bara yang memang rada nakal. Dia, karena bagus produknya, kalorinya dia ekspor, dia akan rela bayar kan, yang seperti itu maksud saya, kira-kira gitu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya kira pemahamannya udah *clear* ini hanya persoalan semantik tadi antara persoalan dipungut atau memungut atau menggalang atau mengumpulkan. Tadi, sebenarnya semula udah memungut tetapi masukan dari Pak Dirjen mungkin kata memungut itu ada konsekuensi kaitanya dengan ketentuan yang lain, misalnya kalau dikatakan memungut maka itu ada kewajiban dengan landasan misalnya Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang perpajakan, misalnya begitu, apa itu.

Maka dengan kalimat lain yakni berupa penggalangan atau pengumpulan, tetapi kalau ternyata memungut itu juga hanya semata-mata semantik, saya kira nggak ada, nggak ada konsekuensi hukumnya.

**ANGGOTA:**

Sedikit Pak Ketua tambahan tadi kan di situ dari badan usaha batu bara. Maksud saya yang tidak memenuhi kewajiban DMO, kalau dia udah penuhi saya pikir nggak perlu dipungut lagi dari dia.

**KETUA RAPAT:**

Betul iya.

**ANGGOTA:**

Pimpinan, Pimpinan, coba, kita ini kan *ending*-nya nanti kan keluar Peraturan Menteri iya kan itu dulu, tugasnya ini kan mengumpulkan iuran untuk memenuhi kebutuhan selisih harga DMO itu.

**KETUA RAPAT:**

Oke, saya kira dari berbagai pertimbangan dan sebagainya kita pakai kata mengumpulkanlah ya.

**ANGGOTA:**

Iya mengumpulkan iuran aja.

**KETUA RAPAT:**

Nanti biarkan di teknis.

**ANGGOTA:**

Pimpinan, izin Pimpinan. Begini, begini sebetulnya saya kembali lagi ke awal, mohon maaf ya Pak, Pak Ridwan ya. Saya pikir kita kembali lagi aja kepada kata-kata memungut iuran karena begini, ini kan hanya penggunaan semantik kata-kata aja toh juga tapi tinggal kita tambahkan, yang bertugas

memungut iuran sesuai dengan aturan yang berlaku dari badan usaha batu bara. Saya pikir itu aja, jadi *clear* kok saya rasa nggak ada ini karena nggak ada, soalnya gini kalau kita ada kata menggalang dana, mengumpulkan dana seakan-akan mohon maaf nanti jadi konotasinya beda nanti.

Jadi poin c-nya berarti mendukung pemungutan iuran sesuai dengan aturan yang berlaku gitu aja.

**ANGGOTA:**

Sedikit lagi interupsi Pak Ketua, sedikit, apakah dari semua badan usaha batu bara atau badan usaha batu bara yang tidak merealisasikan DMO.

**KETUA RAPAT:**

Prakteknya dipastikan adalah yang tidak memenuhi DMO.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Izin Pimpinan, izin Pimpinan, nanti yang merumuskan ini gotong-royong tadi dirjen dari Kementerian ESDM dengan pihak-pihak lain, asosiasi biar saja. Ini udah rumusannya udah bener, udah gitu aja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, *oke* ya. Ini substansinya semua kita semua sepakat.

**ANGGOTA:**

Ini gara-gara Bang Nasir, ini nambah-nambah jadi bias ini.

**F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):**

Bukan, ini Pak Dirjen yang minta interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Udah cukup ya, saya kira hal-hal menjadi perhatian kita menjadi sama.

*Oke*, selanjutnya tadi juga menjadi catatan ke poin ke-6 udah selesai ya.  
6. Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan kepada Komisi VII DPRRI paling lambat tanggal 15 Februari tahun 2022.

Sanggup Pak Menteri ya? Tanggalnya, ini bagaimana ini, 25 ya setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Catatannya sudah jelas. Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian.

Syukur *alhamdulillah* kita hari ini di tengah-tengah Covid dan Omicron dan juga dengan berbagai hormat kami, *respect* dengan seluruh kita baik anggota Komisi VII hadir fisik baik juga melalui *virtual* dan juga Pimpinan Komisi VII beserta Bapak Menteri dengan segenap jajarannya. Hari ini kita telah melakukan rapat kerja sungguh luar biasanya dengan sejumlah kesimpulan yang *Insy* Allah akan menjadi berkah bagi kita semuanya.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum kita tutup dipersilakan Pak Menteri ada catatan-catatan semacam *closing statement*. Dipersilakan Pak Menteri.

**MENTERI ESDMRI (ARIFIN TASRIF):**

Baik.

Terima kasih Bapak-bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Terima kasih atas hasil bahasan dan kesimpulan yang tadi ditelurkan pada rapat kerja agenda rapat kerja kali ini. Atas nama seluruh jajaran kementerian kami mengucapkan apresiasi yang tinggi ya atas tercapainya kesepakatan yang akan telah kita simpulkan. Semoga semua yang kita rencanakan mendapatkan kemudahan untuk bisa kita laksanakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baiklah.

Terima kasih kami sampaikan saya selaku pimpinan sidang dan Pimpinan Komisi VII menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota yang terhormat Komisi VII, baik yang hadir melalui fisik maupun melalui *virtual* dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM dengan segenap jajarannya atas kerja samanya yang sangat-sangat baik dalam rapat kerja hari ini.

Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup.

*Billahi Taufik Wal Hidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.42 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**Dra. Nanik Herry Murti**  
**NIP.196505061994032002**